

UPAYA PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL

(Studi Tentang Pemberdayaan Industri Kendang Sentul sebagai Produk Unggulan dan Daya Saing oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**PRISKA EFFENDY SETIAWAN
NIM: 0810310103**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2012

MOTTO

*Tak ada masalah yang tak bisa di selesaikan selama masih
ada kemauan untuk menyelesaikannya*

(Priska Effendy Setiawan)

**Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya
tetapi kegagalan adalah partner kita menuju
kesuksesan**

(Mario Teguh)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Pemberdayaan Industri Kecil (Studi tentang
Pemberdayaan Industri Kendang Sentul sebagai Produk
Unggulan dan Daya Saing oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Blitar)

Disusun Oleh : PRISKA EFFENDY SETIAWAN

NIM : 0810310103

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Malang, 4 Juni 2012

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

NIP. 19521229 197903 1 003

Drs. Heru Ribawanto, MS.

NIP. 19520911 197903 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3 Juli 2012

Jam : 09.00 WIB

Skripsi atas nama : PRISKA EFFENDY SETIAWAN

Judul : Upaya Pemberdayaan Industri Kecil (Studi tentang
Pemberdayaan Industri Kendang Sentul sebagai
Produk Unggulan dan Daya Saing oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Ketua

Anggota

Dr. Choirul Shaleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001

Drs. Romula Adiono, MAP
NIP. 19620401 198703 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 18 Juni 2012

Nama : Priska Effendy Setiawan

NIM : 0810310103

RINGKASAN

Priska Effendy Setiawan, 2012. **“Upaya Pemberdayaan Industri Kecil” (Studi tentang Pemberdayaan Industri Kendang Sentul sebagai Produk Unggulan dan Daya Saing oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar).**

Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing:

(1) Prof. Dr. Agus Suryono, MS, (2) Drs. Heru Ribawanto, MS, 134+xvi

Peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya melalui sektor kerajinan industri atau produk-produk karya masyarakat merupakan sektor yang paling efektif dalam mengatasi, mencegah kemiskinan dan kelaparan. Tetapi dalam perkembangannya sektor industri kecil mengalami berbagai masalah antara lain: persamaan dan persaingan produk yang dapat di produksi di daerah lain. yang membedakan hanya pada kemajuan teknologi yang dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kota Blitar dalam memberdayakan industri kecil kendang sentul sebagai salah satu produk unggulan dan daya saing daerah dari kota Blitar serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pelaku usaha dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan kota Blitar dalam proses pemberdayaan industri kecil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi serta mencari dokumen-dokumen yang terkait. Fokus penelitian ini antara lain 1. Upaya Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam pemberdayaan industri kecil diantaranya adalah: a) Government provision, b) subsidi, c) regulasi, d) Stimulator, dan d) Koordinator. 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh: a) Pelaku Usaha dan b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa upaya Dinas perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan industri kecil belum maksimal. Dapat dibuktikan dengan lima fokus yang peneliti lakukan, kesemuanya memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Sedangkan untuk daya saing daerah, produksi bubut kayu kendang sentul dibanding dengan daerah lain mempunyai keunggulan kompetitif yang termasuk dalam kategori keunggulan deferensiasi karena kendang sentul mempunyai keunikan dalam bentuk dan motif. Selain itu dari segi sumber daya manusianya bubut kayu kendang sentul merupakan yang terbanyak dibanding daerah lain yaitu mencapai kurang lebih 600 pengrajin yang ada di kota Blitar. Hal ini menempatkan produk industri kecil bubut kayu kendang sentul unggul di tingkat nasional.

Terkait dengan hal di atas, saran yang diberikan yaitu 1. Dalam memberikan pelatihan dan keterampilan kepada pelaku usaha maupun pengrajin harus dilakukan secara terus menerus, bukan bila ada permintaan saja. Selain itu Disperindag harus mendengar kemauan dari peserta mengenai pelatihan apa yang

mereka butuhkan. 2. Disperindag kota Blitar harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah. 3. Pemasaran hasil produksi industri kecil bubut kayu kendang, diharapkan dapat membuka *showroom* baru di daerah tujuan pariwisata. 4. Disperindag dan KPT kota Blitar harus lebih aktif berkoordinasi dengan Satpol PP untuk memeriksa perijinan karena masih banyak yang belum memiliki ijin usaha industri. 5. Diperlukannya teknologi informasi seperti *website* yang menarik, atraktif dan berisi informasi yang aktual kepada masyarakat luas.



SUMMARY

Priska Effendy Setiawan, 2012. **“Empowerment Efforts Small Industry ”(Studies on the Empowerment of Sentul as Kendang Industry Superior Products and Competitiveness by the Department of Industry and Trade of the Blitar).**

Department of Public Administration, Universitas Brawijaya Malang. Supervisor:

(1) Prof. Dr. Agus Suryono, MS, (2) Drs. Heru Ribawanto, MS, 134+xvi

Increased local community economy can be done in many ways. One was through handicraft industrial sector or products work of society is the most effective sector in addressing, preventing poverty and hunger. But the development of small industry sector experience to share problems, among others: competition and equation the products can be produced in other areas. The only difference in the advancement of technology owned by the region.

Based on the above objectives of this study was to determine and analyze the efforts of Departement Industry and Trade in the Blitar city government to empower small-scale industries as one of the Kendang Sentul superior products and the competitiveness of the Blitar city government and find out the enabling factors and constraints faced by Business Actor and Department of Industry and Trade and the Blitar city government in the process of empowerment of small scale industries.

This study uses descriptive research method with qualitative approach to data collection using the interview technique, observation and search-related documents. The focus of this study include 1. Efforts department Industry and trade in the empowerment of small scale industries such as: a) Government provision, b) subsidies, c) regulations, d) stimulator, and d) Coordinator. 2. Enabling factors and constraints experienced by: a) Business Actor, and b) Department of Industry and Trade.

The results of this study stated that the efforts of Departement Industry and Commerce Office in the empowerment of small industries is not maximized. Can be proved by the five focus the researchers did, all of which have drawbacks that must be corrected. As for the regional competitiveness, production of wood lathe kendang sentul compared with other regions have a competitive advantage in the category of excellence as kendang sentul differentiation in shape and has a unique motif. In addition in terms of human resources kendang sentul of wood lathe is the most compared to other regions, reaching approximately 600 craftsmen in city government. This puts a small lathe wood products industry superior kendang sentul at the national level.

Related to the above, the advice given is 1. In providing training and skills to the business and craftsmen must be done continuously, not just when there is demand. In addition Disperindag should hear willingness of participants to the training they need. 2. Disperindag Blitar city government must cooperate with other financial institutions in providing capital to low-interest loans. 3. Marketing of industrial production of small wood lathe drum, is expected to open a new showroom in the area of tourism destination. 4. Disperindag and KPT Blitar city

government should be more actively coordinate with Satpol PP to check because there are many business actor do not have industrial license. 5. Need for information technology as an attractive website, interesting and contains the actual information to the public.



KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Allah atas karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Judul skripsi ini adalah **“Upaya Pemberdayaan Industri Kecil (Studi tentang Pemberdayaan Industri Kendang Sentul sebagai Produk Unggulan dan Daya Saing oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar)”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa keterlibatan dari berbagai pihak yang berkenan membantu memberikan pemikiran, kritik, dan saran-saran, karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS selaku Komisi pembimbing I atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Komisi pembimbing II atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si dan Bapak Drs. Romula Adiono selaku dosen penguji atas bantuannya dalam perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu yang diberikan.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar, Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Kota Blitar, Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar atas bantuan dan kerjasamanya.

7. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Supar dan ibu Eny Handayani, S.pd terima kasih atas doa dan dukungan baik moral maupun materil.

8. Bapak Digo dan bapak Romdhoni selaku pengrajin dan pengurus paguyuban kendang kelurahan tanggung atas segala bantuan dan kerjasamanya.

9. Sahabat-sahabat maupun teman-teman FIA Universitas Brawijaya Malang angkatan 2008 yang telah memberikan kenangan, semangat, dan dorongan dalam penyelesaian skripsi.

10. Sahabat-sahabat di Kota Blitar: Adit, Dios, Eddo, Betrik, dan Dila yang aku sayangi atas dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi.

11. Dan semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Allah Yang Maha Esa membalas budi baik kalian semua.

Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah atau lupa. Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

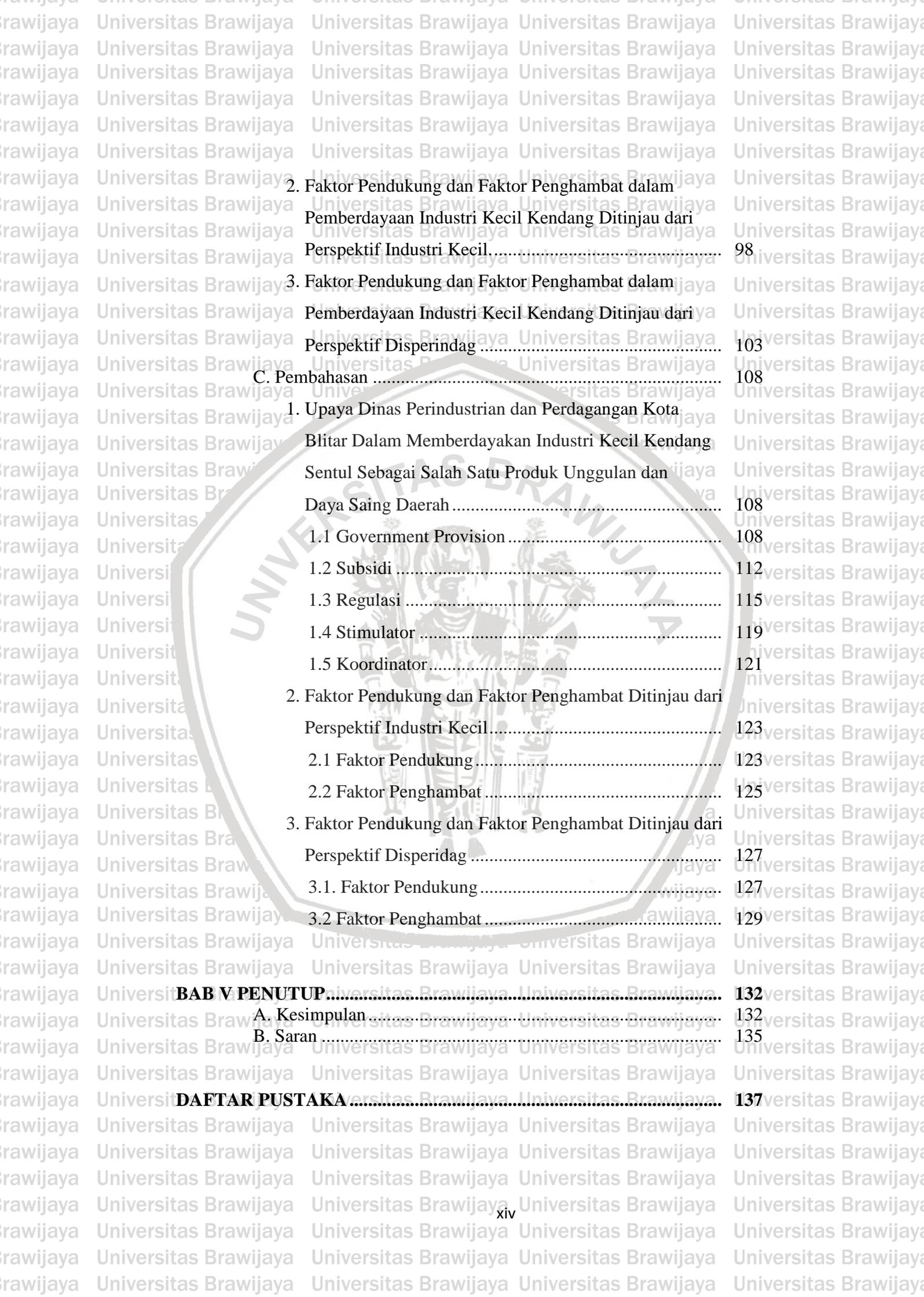
Malang, Juni 2012

(Priska Effendy Setiawan)

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Local Economic Development	12
1. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perekonomian	15
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi	17
B. Pemberdayaan	18
1. Pengertian Pemberdayaan	18

2. Tujuan Pemberdayaan	20
3. Tahap-Tahap Pemberdayaan	20
4. Strategi Pemberdayaan	22
C. Industri Kecil	23
1. Pengertian Industri Kecil	23
2. Bentuk Pengembangan Industri Kecil	25
3. Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Kecil	27
4. Keunggulan Dan Kelemahan Industri Kecil	32
5. Peranan Industri Kecil Dalam Pembangunan	34
D. Konsep Keunggulan Kompetitif	36
 BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi dan Situs Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian	45
G. Analisis Data	46
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Gambaran Umum Kota Blitar	49
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar	58
B. Data Fokus Penelitian	79
1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam Memberdayakan Industri Kecil Kendang Sentul Sebagai Salah Satu Produk Unggulan dan Daya Saing Daerah	79



2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Industri Kecil Kendang Ditinjau dari Perspektif Industri Kecil.....	98
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Industri Kecil Kendang Ditinjau dari Perspektif Disperindag.....	103
C. Pembahasan.....	108
1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Dalam Memberdayakan Industri Kecil Kendang Sentul Sebagai Salah Satu Produk Unggulan dan Daya Saing Daerah.....	108
1.1 Government Provision.....	108
1.2 Subsidi.....	112
1.3 Regulasi.....	115
1.4 Stimulator.....	119
1.5 Koordinator.....	121
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Ditinjau dari Perspektif Industri Kecil.....	123
2.1 Faktor Pendukung.....	123
2.2 Faktor Penghambat.....	125
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Ditinjau dari Perspektif Disperidag.....	127
3.1. Faktor Pendukung.....	127
3.2 Faktor Penghambat.....	129

BAB V PENUTUP..... 132

A. Kesimpulan..... 132

B. Saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA..... 137

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Model Keunggulan Kompetitif	38
2.	Analisis Model Interaktif	48
3.	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar	63
4.	Bapak Digdo selaku pengrajin kendang kendang sentul	83
5.	Ibu Erna Woerijaningsih selaku Kepala Seksi Logam, Mesin, dan Kimia Disperindag	84
6.	Foto Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penguatan Ekonomi	86
7.	SOP Manajemen Pelayanan Perijinan	89
8.	Bapak Romdhoni selaku Ketua Paguyupan Pengrajin Bubut Kayu	93
9.	Pameran Expo Batam 2011	94
10.	Showroom Produk Kerajinan Dan Makanan Khas Kota Blitar	95
11.	Sosialisasi Perijinan KPT dengan Disperindag	97



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Blitar Tahun 2012	55
2.	Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	57
3.	Kepadatan Penduduk Kota Blitar Menurut Kecamatan	57
4.	Data Pegawai Menurut Golongan Tahun 2012	77
5.	Data Pegawai Menurut Eselon Tahun 2012	77
6.	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin	78
7.	Data Industri Unggulan Kota Blitar Tahun 2011	78
8.	Data Jumlah Pengrajin Bubut Kayu Kendang Kelurahan Tanggung	79
9.	Data Jenis Pelatihan Kerajinan Kayu 2008-2011	81
10.	Daftar Bantuan Peralatan Yang Diterima Oleh Paguyuban Industri Kecil Bubut Kayu Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul 2008-2009	87
11.	Data Industri Kecil Bubut Kayu Kendang Formal Kota Blitar	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Salah satu bidang yang sering menjadi skala prioritas adalah pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi ini meliputi sektor industri yang memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan struktur ekonomi nasional dengan memberikan dampak terhadap perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai produksi, peningkatan daya saing industri, peningkatan sumber daya manusia serta peningkatan penguasaan teknologi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut juga tertuang dalam pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terangkum dalam suatu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan banyak cara.

Salah satunya melalui sektor kerajinan industri atau produk-produk karya masyarakat merupakan sektor yang paling efektif dalam mengatasi dan mencegah

kemiskinan dan kelaparan. Akan tetapi tidak akan terjadi dengan efektif bila pembangunan ekonomi ini tidak disertai dengan prakasa maupun peran aktif dari pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai *stake holder*.

Menurut Siagian seperti yang dikutip oleh Suryono (2004:21)

pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan di Indonesia saat ini di hadapkan pada suatu permasalahan yang sangat kompleks yaitu masalah kemiskinan.

Pada dasarnya kemiskinan itu bukan sekedar fenomena, tetapi lebih merupakan proses yang terjadi karena kerentanan yang melanda banyak faktor misalnya saja kurang berdayanya masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan. Saat ini penanggulangan kemiskinan yang terjadi masih pada tataran tulisan yang berupa kebijakan-kebijakan atau program-program pengentasan kemiskinan dalam memenuhi kebutuhannya saja tanpa member pemberdayaan kepada masyarakat untuk mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Pemikiran yang seperti ini yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan dianggap belum mampu memecahkan masalah yang sebenarnya.

Untuk itu perlu adanya *action* dari pemerintah daerah bila ingin serius dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang benar.

Menurut Korten seperti yang dikutip oleh Sulistiyani (2004:37) ada dua pendekatan dalam pembangunan masyarakat dalam pengambilan kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan

bottom-up. Pendekatan *top-down* merupakan pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau objek pembangunan saja. Sedangkan *bottom-up* yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat di dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi.

Pendekatan pembangunan yang berusaha menumbuhkan keberdayaan kepada masyarakat hendaknya menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan. Dengan kata lain pendekatan yang dirasa cocok untuk dilaksanakan adalah pendekatan *bottom-up*.

Dengan pendekatan *bottom-up*, diharapkan masyarakat dapat terlibat dalam pengentasan kemiskinan secara langsung sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terwujud.

Pada era globalisasi saat ini dan menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbuka pasar dalam negeri maupun produk dari luar negeri diperlukan peran dari pemerintah daerah dalam pembangunan di berbagai sektor terutama sektor ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang, arah pembangunannya akan diarahkan pada kemampuan menghapuskan masalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi masyarakat baik di lingkungan perkotaan maupun lingkungan pedesaan.

Salah satu penggerak dari perekonomian masyarakat adalah industri, sektor industri mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan dan tidak lepas dari usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang ada.

Pengembangan sektor industri yang sesuai dengan kondisi dari masyarakat Indonesia adalah sektor industri kecil. Industri kecil sebagai pelaku ekonomi disamping yang berskala besar dan menengah memiliki daya tahan yang cukup tangguh jika dibandingkan dengan industri besar.

Berkaitan dengan industri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap perkembangan industri di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah mengarisikan lima bidang yang diutamakan dalam pengembangan industri. Bidang-bidang tersebut yaitu:

1. Industri yang menunjang sektor pertanian dengan produksi sarana-sarana pertanian/mengolah hasil pertanian sehingga dengan demikian pembangunan sektor pertanian menarik dan merangsang sektor industri
2. Industri yang menghasilkan devisa atau menghemat devisa dengan jalan menghasilkan barang-barang pengganti impor, untuk barang-barang ini jelas ada pasarnya di dalam negeri
3. Industri yang mengolah lebih banyak bahan-bahan dalam negeri dari pada bahan-bahan luar negeri
4. Industri yang relatif menggunakan lebih banyak tenaga kerja dari pada modal untuk memperluas lapangan kerja
5. Industri yang dapat membangkitkan kegiatan pembangunan daerah.

Sektor industri merupakan suatu wadah usaha untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja manusia yang dapat memperbesar nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Dalam perekonomian di Indonesia sektor industri yakni industri kecil menempati posisi strategis yang tidak perlu di ragukan lagi. Penduduk Indonesia yang sangat banyak dengan tingkat pendidikan yang masih rendah menjadikan industri kecil lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga berkurangnya tingkat

penganguran. Karena industri kecil menggunakan teknologi yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat untuk bekerja.

Keberadaan industri kecil sangatlah berjasa dalam pendistribusian pendapatan masyarakat serta mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan agar tidak hilang dan tetap mengakar kuat. Jangkauan industri kecil mampu mencapai daerah-daerah terpencil karena keberadaannya disesuaikan dengan potensi sumber daya alam sekitarnya. Selain itu industri kecil yang berada di daerah pedesaan juga dapat mengurangi arus urbanisasi dan migrasi ke kota.

Namun dalam perkembangannya, sektor industri mengalami berbagai masalah. Diantaranya adanya iklim usaha yang kurang kondusif, terkonsentrasi di pulau jawa, pemanfaatan teknologi yang masih rendah ditengah persaingan industri dunia yang semakin tajam, serta lemahnya peranan sektor industri kecil dan menengah. Hal ini tentu menjadi tantangan utama pengembangan industri nasional yang layak diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Sedangkan menurut Juwani (1996:15) masalah-masalah yang sering dihadapi oleh industri kecil adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam mempunyai peluang (akses) pasar dan memperbesar pangsa pasar
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen
4. Keterbatasan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi
5. Keterbatasan dalam jaringan usaha dan kerja sama usahanya
6. Kelemahan dalam mentalitas usaha.

Tambunan (2002:70-81) menambahkan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh industri kecil antara lain:

- 1. Kesulitan pengadaan bahan baku
- 2. Kesulitan membayar pekerja
- 3. Kekurangan energi.

Sedangkan menurut Hanafi dan Hardjanto (2006:42) kendala/tantangan yang sering dihadapi oleh kebanyakan industri kecil adalah sebagai berikut:

- 1. Kelemahan struktural, yaitu dalam struktur perusahaan semisal kelemahan manajemen, pengendalian mutu, penguasaan teknologi, permodalan dan terbatasnya akses pasar
- 2. Kelemahan kultural, yaitu seperti informasi peluang, informasi mendapatkan bahan baku dan informasi pengembangan produk.

Tidak hanya berhenti di kelemahan ataupun tantangan yang sering dihadapi oleh industri kecil, industri kecil yang digambarkan sebagai sektor yang paling penting dalam pembangunan ekonomi dan dikelola oleh dua departemen, yaitu Departemen Koperasi dan UMKM dengan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan ternyata masih mengalami banyak diskriminasi yang akibatnya menjadikan kemajuan industri kecil sangat kecil bila dibandingkan dengan industri besar. Pemerintah lebih banyak berpihak pada pengusaha besar pada hampir semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri.

Dengan banyaknya kelemahan/kendala dan diskriminasi yang menjadikan industri kecil itu tidak banyak mengalami kemajuan, maka pembinaan dan pengembangan industri kecil yang dirasa sangat penting harus segera di upayakan sebaik mungkin sehingga kemandirian dan peran yang sangat strategis yang dimiliki oleh industri kecil dapat tercapai.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka Dinas Perindustrian Dan Perdagangan harus berperan aktif dalam pengembangan suatu industri kecil

dengan mengutamakan potensi, ciri khas dan sumber daya manusia pada suatu daerah khususnya Kota Blitar. Tiap daerah, bisa dipastikan mempunyai potensi yang bisa digali untuk dijadikan ciri khas dari daerah yang bersangkutan. Bentuknya pun bisa bervariasi dari pesona lingkungan maupun dari produk olahan.

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Kota Blitar juga dapat dikatakan sebagai kota yang miskin potensi, karena secara ekonomis Kota Blitar tidak mempunyai sumber daya alam galian, mineral maupun hasil hutan dan kekayaan alam lainnya yang melimpah. Dengan demikian untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan Kota Blitar melakukan terobosan melalui pengembangan sumber daya manusia maupun sumber daya buatan.

Di Kota Blitar terdapat suatu perkampungan yang dinamai dengan kampung industri bubut kayu yang terkenal dengan hasil olahan kerajinan kendang sentul atau kendang jimbe terletak di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul. Dan ini yang disebut dengan terobosan melalui pengembangan sumber daya manusia maupun sumber daya buatan untuk menopang kelangsungan pemerintah Kota Blitar dalam otonomi daerah. Kelurahan Tanggung merupakan salah satu wilayah yang ada di Kota Blitar yang mempunyai banyak produk kerajinan mainan anak-anak yang terbuat dari kayu sebut saja yoyo, ketapel, dan mobil-mobilan. Ada juga potensi unggulan dari Kota Blitar yang dijadikan icon atau ciri khas yang dihasilkan di Kelurahan Tanggung ini yaitu kerajinan bubut kayu kendang sentul atau kendang jimbe.

Secara ekonomi, industri kecil kerajinan bubut kayu kendang sentul saat ini telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tanggung.

Terlihat dari banyaknya pengrajin kendang sentul sehingga menyerap banyak tenaga kerja yang pada akhirnya menekan angka pengangguran di daerah tersebut.

Untuk pemasaran produk kerajinan bubut kayu kendang sentul tidak hanya melingkupi pasar domestik saja, tetapi saat ini sudah mampu menembus pasar internasional. Bila dilihat dari nilai jual, kendang sentul juga mempunyai daya saing yang tinggi dan tidak kalah dengan produk-produk dari daerah lain.

Pemilihan bahan baku yang berkualitas baik sehingga tahan lama, motif ukiran yang beragam, dan varian bentuk kendang sentul dari ukuran yang kecil hingga besar menjadi nilai plus tersendiri.

Namun yang menjadi kendala saat ini yaitu semakin banyaknya persaingan dan persamaan jenis produk dari dalam negeri yang bisa dibuat di daerah lain dengan kemajuan teknologi. Inovasi dan kreatifitas dari pengrajin merupakan sesuatu cara yang harus dilakukan untuk mengatasi persaingan dalam persamaan jenis produk, sehingga akan muncul variasi baru dengan mutu yang lebih baik lagi. Sebagai suatu tempat orang menggantungkan nasibnya, para pengrajin kendang sentul tidak boleh mati. Mereka harus mampu tumbuh, berkembang dan bertahan (*survive*) dari berbagai persaingan produk dalam negeri maupun luar negeri melalui bimbingan dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan terhadap industri kecil bubut kayu kendang sentul yang ada pada Kelurahan Tanggung sangat diperlukan bagi pengrajin kendang sentul. Sehingga harapan kedepannya kualitas dan

kuantitas produksi akan lebih baik lagi dan mampu bersaing dengan produk-produk lain dari luar daerah Kota Blitar disertai dengan jangkauan pemasaran yang lebih luas.

Berdasarkan dari pemikiran tersebut peneliti berkeinginan mengetahui peran yang begitu besar yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan industri kecil kendang sentul mengingat besarnya pengaruh perbaikan yang sejalan dengan manfaatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam memberdayakan industri kecil kendang sentul sebagai salah satu produk unggulan dan daya saing daerah Kota Blitar?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pelaku usaha dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar dalam proses pemberdayaan industri kecil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar dalam memberdayakan industri kecil kendang

sentul sebagai salah satu produk unggulan dan daya saing daerah dari Kota Blitar.

- 2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pelaku usaha dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar dalam proses pemberdayaan industri kecil.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan memberi kontribusi bagi beberapa pihak:

- 1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dan penelitian lain mengenai ilmu pengetahuan dan wawasan tentang perberdayaan khususnya pada sektor industri kecil.
- 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar dalam mengembangkan serta mencari solusi pemecahan masalah-masalah industri kecil.
- 3. Bagi peneliti sendiri, sebagai sarana atau wahana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan dalam befikir praktis.
- 4. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan-bahan perbandingan bagi peneliti-peneliti terdahulu dan menjadi referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penetian dengan topik yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kerangka teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian masalah tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum Kota Blitar, gambaran umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar, upaya pemberdayaan industri kecil di Kelurahan Tanggung yang meliputi pengembangan SDM, pengembangan teknologi, promosi pemasaran dan pembinaan modal. Serta pembahasan tentang hal-hal yang menjadi kendala maupun pendukung dalam pemberdayaan tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dijabarkan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu guna perbaikan kearah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Local Economic Development* (LED)

Konsep *Local Economic Development* (Pengembangan Ekonomi Lokal)

merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang mendasarkan pada pendayagunaan sumber daya lokal yang ada pada suatu masyarakat, sumber daya manusia, sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bersama pemerintah lokal maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Untuk mencapai tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal juga dipengaruhi oleh adanya pergerakan pembangunan dengan sistem pasar terbuka dimana hubungan antar wilayah bahkan antar negara sudah tidak ada batas (*borderless*).

Menurut World Bank (2001) pengembangan ekonomi lokal sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Menurut Blakely and Bradshaw seperti yang dikutip oleh Suandy (1998) pengembangan ekonomi lokal adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan menurut International Labour Organization ILO

(2001) Pengembangan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. (Jayadi, 2011)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk bermitra dan mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah yang didasarkan pada keadaan lokalitasnya (*locally based development*).

Ada beberapa tujuan dan sasaran yang ingin di capai dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat ini, diantaranya adalah:

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif
 2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis
 3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal
 4. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB
 5. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan
 6. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah
 7. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.
- (<http://www.kendarikota.go.id/pdf/konsep%20PEL.ppt>)

Dalam merencanakan dan mengembangkan perekonomian lokal, konsep *Local Economic Development* akan membawa pemerintah lokal dan organisasi

masyarakat untuk mengambil perspektif baru dan berbeda terhadap prakarsa pengembangan yang terencana dan terorganisir, dan komunitas besar atau kecil perlu memahami semiskin atau sekaya apapun pemerintah lokal, masyarakat dan sektor swasta adalah mitra kerja yang penting dalam proses pengembangan ekonomi. Salah satu program dari *Local Economic Development* yaitu munculnya kawasan sentra industri yang bertujuan untuk mengembangkan produksi berbasis kelompok komoditas unggulan tertentu pada suatu wilayah melalui kerjasama antar pemerintah dan swasta.

Konsep *Local Economic Development* sangat dipengaruhi oleh pemerintah dan swasta/pengusaha dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah. Pemerintah daerah mempunyai kelebihan dalam satu hal dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai inisiatifnya memenuhi kebutuhan itu. (Supriyadi, 2007:13)

Adapun prinsip-prinsip manajemen pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta/pengusaha yang pro-bisnis adalah antara lain sebagai berikut:

1. Menyediakan Informasi Kepada Pengusaha. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi di daerahnya ataupun

di luar daerahnya kapan, dimana, dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah

2. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan. Salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah sedangkan pihak investor memerlukan ada kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah. Strategi pembangunan ekonomi daerah yang baik dapat membuat pengusaha yakin bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari
3. Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan. Sektor ekonomi yang umumnya berkembang cepat di kota-kota adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan investasi yang lebih besar. Adanya banyak pusat-pusat pedagang kaki lima yang efisien dan teratur akan menarik lebih banyak investasi bagi ekonomi daerah dalam jangka panjang
4. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah. Meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakuan khusus harus ditinggalkan. Proteksi perlu ditiadakan segera ataupun bertahap. Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis
5. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi. Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; klaster industri, dsb. (Darwanro, 2002:5)

1. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perekonomian

Peran dan fungsi pemerintah dalam pembangunan sangat dibutuhkan bagi negara-negara yang baru berkembang atau belum maju, meskipun cara pelaksanaan dari peranan dan fungsi tersebut dapat berbeda-beda. Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan bisa dilakukan melalui pimpinan dan pengaturan negara, atau pemberian kebebasan pada sektor swasta yang cukup

besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana dimana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahan serta melakukan cara-cara tak langsung (dengan menggunakan banyak upaya melalui mekanisme pasar/harga) untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas.

Peranan dan fungsi pemerintah dalam perekonomian cukup beralasan dan mustahil untuk dicegah. Tidak ada satu perekonomian pun, termasuk di negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya, hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar kadar intervensi yang dilakukan. Ada negara yang pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian, ada juga negara yang campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah menurut Tarwiyanto (2010:30) dapat dipilah menjadi empat macam yaitu:

1. Peran alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi
2. Peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar
3. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan tidak seimbang dan
4. Peran dinamisatif, yakni peran pemerintah di dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Menurut Tjokroamidjojo (1994:18) peranan dan fungsi pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk. Pertama adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban pengembangan. Kedua, peranan pemerintah sebagai *service state*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Ketiga, peranan pemerintah sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

Tjokroamidjojo (1994:19) juga memberikan klasifikasi mengenai cara pelaksanaan peranan pemerintah:

1. Fungsi pengaturan terdiri
 - a. Penentuan kebijaksanaan
 - b. Pemberian pengarahan dan bimbingan
 - c. Pengaturan melalui perizinan
 - d. Pengawasan
2. Fungsi Pemilikan, pemerintah memiliki sendiri usaha-usaha pembangunan ekonomi atau sosial yang penyelenggarannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta
3. Fungsi Penyelenggaraan, pemerintah menyelenggarakan sendiri semua kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial.

Pentingnya peranan dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama dalam sistem ekonomi menurut Rachbini (1994:83) didasarkan paling tidak ada dua alasan. Pertama timbulnya kegagalan pasar dalam sistem ekonomi, membuka kemungkinan masuknya peranan negara untuk mendorong terwujudnya mekanisme pasar yang efektif sehingga kesejahteraan para pelaku ekonomi bisa tercapai secara lebih baik. Kedua, kenyataan terdapatnya kegagalan distribusi pendapatan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranan pemerintah lebih tertuju untuk melakukan kebijakan redistribusi kembali sumber-sumber ekonomi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi menurut Adyanta adalah

- a. Faktor ekonomi
 - 1) Sumber Daya Alam, merupakan faktor input yang akan diubah menjadi output sumber daya alam yang beraneka ragam menjadikan kekayaan akan bahan baku untuk dijadikan beraneka jenis produk tanpa harus mengimpor dari Negara lain.

- 2) Sumber Daya Manusia, merupakan tenaga kerja yang potensial untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi suatu negara.
- 3) Pembentukan modal, merupakan pendapatan yang ditabung untuk diinvestasikan ke produksi dalam bentuk bahan baku peralatan, pabrik baru dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.
- 4) Kemajuan IPTEK, merupakan kemajuan dalam pengetahuan, hasil riset dan mendapatkan penemuan-penemuan baru dengan teknologi baru sehingga dapat meningkatkan produktifitas lebih cepat.
- 5) Kewirausahaan, merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis.

b. Faktor non ekonomi

- 1. Sosial, keadaan sosial masyarakat merupakan kebiasaan adat istiadat kebudayaan yang dimiliki dapat menciptakan tingkat ketentraman masyarakat suatu Negara.
- 2. Politik, suhu politik negara akan dapat mempengaruhi keadaan ketenangan masyarakat suatu negara.
- 3. Institusional, kelembagaan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat suatu negara.

(<http://imadeadyanta.blogspot.com/2010/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>)

B. Pemberdayaan

1. Pengertian pemberdayaan

Konsep pemberdayaan atau *empowerment* yang dibidangi oleh Friedmann seperti yang dikutip oleh Hardjanto (2008:24), muncul karena adanya dua hal yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul akibat adanya alternatif-alternatif pembangunan yang dimasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:214), istilah pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga

untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan asal katanya pemberdayaan atau memberdayakan berasal dari kata *empowerment* dan *empower* yang menurut Webster seperti yang dikutip oleh Sedamaryanti (2003:59) mengandung arti:

“Pertama, *to give power or authority to*, serta arti kedua berarti *to give ability to or enable*. Dimana pengertian pertama mengandung makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otorisasi kepada pihak lain. sedangkan dalam pengertian kedua mengandung makna sebagai upaya memberi kemampuan atau memberdayakan.”

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat, *et al.* (2000:4) mengandung tiga pengertian, yaitu:

“Pertama, pemihakan atau memberi prioritas kepada yang paling memerlukan. Kedua, mempersiapkan pada masyarakat yang memperoleh prioritas dalam upaya menyamakan level (*level playing field*) dan yang ketiga melindungi segenap pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang mempunyai prioritas diberdayakan.”

Sedangkan menurut Kartasasmita (1996:144), bahwa memberdayakan masyarakat mengandung arti:

“Upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan marabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu, hanya dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi memberdayakan mempunyai pengertian memampukan dan memandirikan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.”

Pengertian pemberdayaan di atas berdasarkan asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya. Pada dasarnya semua masyarakat mempunyai potensi, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna dari pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang

diharapkan. (b) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

2. Tujuan Pemberdayaan

Pada awalnya upaya pemberdayaan masyarakat pasti dihadapkan pada kondisi masyarakat yang lemah. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu atau masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi tercapainya pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat seperti yang dikutip oleh Sulistiyan (2004:82), "Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi". Dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri.

Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa pemberdayaan harus melalui suatu masa proses belajar maka akan ada tahap-tahap yang harus dilalui. Tahap-tahap tersebut yaitu meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. (Sulistiyani, 2004:83)

Pada tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

Sentuhan penyadaran diharapkan dapat membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat ini. Dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi kearah yang lebih baik lagi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama terlaksana dengan baik. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan, kecakapan dan keterampilan yang memiliki hubungan dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Kesadaran ini akan merangsang terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan dan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya

menjadi objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi didalam lingkungannya.

Apabila masyarakat telah mencapai tahap ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini sering kali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja. Namun masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetap perlu dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

4. Stategi Pemberdayaan

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan, maka diperlukan adanya suatu pendekatan dan strategi pemberdayaan. Menurut Elliot seperti yang dikutip oleh Pranarka dan Prijiono (1996:13), di dalam pemberdayaan perlu adanya strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

- a. *The welfare approach*. Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi memperkuat keberdayaan masyarakat

dalam pendekatan *sentrum of power* dari kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri

- b. *The development approach*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- c. *The empowerment approach*. Pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Sementara pendekatan lain disampaikan oleh Suharto (2005:67) terdiri dari 5 P yaitu pemingkinan, penguatan, perlindungan, pengokongan, dan pemeliharaan.

- a. Pemingkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat *cultural dan structural* yang menghambat.
- b. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- d. Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

C. Industri Kecil

1. Pengertian Industri Kecil

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku atau bahan setengah jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan merancang bangun dan perekayasaan industri. Sementara Pengertian industri,

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:378) yaitu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin.

Menurut Dumairy (1996:227), industri mempunyai dua arti antara lain:

“Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan industri kosmetika, misalnya berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik. Kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.”

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecilnya skala usaha dilakukan oleh beberapa lembaga, dengan kriteria yang berbeda-beda. Biro Pusat Statistik membedakan skala industri menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu

1. Industri besar: berpekerja 100 orang atau lebih
2. Industri sedang: berpekerja 20 sampai 99 orang
3. Industri kecil: berpekerja 5 sampai 19 orang
4. Industri/ kerajinan rumah tangga: berpekerja < 5 orang

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil memberikan kriteria industri kecil sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar
3. Milik warga negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Minzerg seperti yang dikutip oleh Irianto (1996:7) memberikan batasan sektor usaha kecil yaitu sebagai:

“Organisasi yang memiliki *enterprenual organization*, dengan ciri-ciri antara lain: struktur organisasinya yang sangat sederhana, karakteristiknya khas biasanya tanpa staf yang berlebih, pembagian kerja yang kendur, dan memiliki herarki manajer yang kecil. Aktifitas mereka hanya sedikit dan di formalkan, sangat sedikit menggunakan proses perencanaan dan jarang sekali mengandalkan pelatihan dan manajer mereka. Ciri lainnya adalah pada umumnya sektor usaha kecil sulit membedakan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Mereka juga kurang baik sistem administrasinya dan bahkan tidak memiliki. Para pengusaha kecil dan menengah memiliki sifat dalam menghadapi investasi hampir sama dengan perorangan.”

Dari berbagai macam pengertian dan kriteria tentang industri kecil diatas, dapat disimpulkan bahwa industri kecil merupakan suatu kegiatan produksi mengolah bahan mentah menjadi barang barang jadi atau setengah jadi yang memiliki karakteristik yang khas, baik dari hasil maupun dari jumlah aset maupun karyawan. Memiliki struktur organisasi sederhana, manajemen yang lemah serta memiliki keterbatasan-keterbatasan lain seperti pemasaran dan modal.

2. Bentuk Pengembangan Industri kecil

Sebelum mengetahui dan membicarakan bentuk pengembangan industri kecil, sebaiknya kita pahami dulu arti dari pengembangan. Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:478) adalah proses, cara pembuatan mengembangkan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil pasal 1, pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dari dua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan seseorang atau beberapa orang, baik itu berbentuk

orang, perorangan maupun organisasi, dengan melalui pemberian bantuan yang berupa materiil dan atau non materiil dengan tujuan untuk menjadikan lebih baik dari sebelumnya.

Pengertian industri, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:378) yaitu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Jadi dapat disimpulkan bahwa industri adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah suatu bahan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian pengembangan industri adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang baik itu berbentuk perseorangan maupun organisasi dengan melakukan pemberian bantuan baik berupa materiil maupun non materiil dengan tujuan untuk menjadikannya lebih baik dari sebelumnya dengan mengolah sesuatu bahan yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.

Bentuk pengembangan industri kecil dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Menurut Syahril Syarif (1991:3), bahwa bentuk-bentuk pengembangan industri kecil meliputi:

1. Perangkat lunak, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan diklat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
 - b. Pembinaan usaha
 - c. Bantuan promosi dagang
 - d. Keringanan dan kemudahan yang diberikan pada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangnya usaha.
2. Perangkat keras, meliputi:
 - a. Penyediaan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha pada sentra-sentra industri kecil
 - b. Bantuan langsung pada pengusaha industri kecil seperti penyediaan tempat usaha dan bantuan permodalan.

Selain bentuk pengembangan industri kecil, pola pembinaan atas iklim usaha bagi industri kecil juga sangat diperlukan. Ruang lingkup pembinaan industri kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Adapun pola pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32

Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi.
2. Penyiapan program pembinaan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi.
3. Pelaksanaan program pembinaan.
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan program pembinaan industri kecil dapat berjalan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan adanya upaya dari identifikasi masalah hingga pemantauan dan pengendalian program pembinaan.

Sehingga bila ada kemungkinan kegagalan dalam upaya pembinaan tersebut dapat segera di atasi dengan upaya lebih tepat.

3. Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Industri Kecil

Tahapan awal yang penting dalam mengembangkan industri kecil adalah memahami permasalahannya, hambatannya, tantangan, peluang, kesempatan, yang dihadapi oleh industri kecil dan berusaha mencari faktor kunci keberhasilan.

Setiap produk atau komoditas memiliki karakteristik yang unik berkaitan dengan faktor kunci keberhasilannya, sehingga perlu penanganan yang berbeda-beda pula.

Dengan demikian, pelaku usaha kecil adalah faktor utama keberhasilan setiap produk usaha kecil yang dipilihnya.

Adapun beberapa strategi yang digunakan oleh pemerintah yang perlu dikembangkan antara lain:

a. Government Provision

Government provision pada hakekatnya merupakan bentuk peran pemerintah secara langsung dimana pemerintah menyediakan pelayanan kepada masyarakat tanpa melakukan pemungutan kepada individu-individu yang menikmatinya.

Guna mengimplementasikan peran sebagai *government provision*, pertama, pemerintah daerah perlu mengkaji kembali upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia industri kecil dengan memberikan pelatihan dan keterampilan guna menunjang bidang usaha yang dijalankan oleh para pelaku ekonomi tersebut. Kedua pemerintah daerah harus lebih optimal lagi dalam meningkatkan penguasaan teknologi bagi industri kecil, seperti halnya penggunaan teknologi tepat guna maupun penguasaan teknologi digital. Guna menyongsong era globalisasi yang mana pelaku pasar tidak lagi berorientasi pada pasar domestik tetapi pasar internasional. Sedangkan yang ketiga, pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan manajemen dan organisasi pada industri kecil yang sekarang masih tradisional agar pengusaha industri kecil mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan berupa modal.

b. Subsidi

Subsidi merupakan keterlibatan pemerintah secara tidak langsung dan pada dasarnya adalah berupa bantuan dana (*grants*) secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengimplementasi peran ini, pertama pemerintah harus secara adil dan bijak dalam memberikan modal usaha bagi pengembang industri kecil.

Dewasa ini dalam mengaktualisasikan peran ini terkadang pemerintah salah

sasaran sehingga industri kecil yang seharusnya dibantu justru tidak dibantu.

Bantuan tidak hanya berupa modal, tetapi juga dalam bentuk peralatan penunjang usaha. Kedua, pemerintah daerah harus membuka kran kemudahan akses permodalan dari lembaga daerah yang ada di daerah. Dengan lembaga perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah mempunyai peluang yang lebih besar untuk menggandeng para pengusaha industri kecil untuk dapat eksis dalam mengembangkan usahanya.

c. Regulasi

Regulasi merupakan keterlibatan pemerintah secara tidak langsung berupa pembuatan kebijakan pelayanan yang ditujukan baik kepada produsen pelayanan maupun pihak konsumen. Untuk mereliasasikan produk pelayanan ini pertama kali pemerintah harus mengeluarkan kebijakan persaingan sehat, sebab tanpa persaingan yang sehat, posisi jual industri kecil akan dapat terkalahkan oleh para pelaku usaha berskala besar sehingga bukan hanya berdampak pada macetnya industri kecil tetapi juga dapat mengancam eksistensi dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah. Langkah kedua adalah pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan pengurangan beban ekonomi biaya tinggi. Hal ini dapat di aktualisasikan dengan adanya pembentukan kantor pelayanan terpadu satu atap dimana segala pelayanan yang berhubungan dengan industri kecil baik itu perijinan dan lain sebagainya cukup diselesaikan dalam satu kantor tersebut.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah-daerah dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlet untuk produk industri kecil dan membantu industri kecil untuk melaksanakan pameran. Adapun langkah pemerintah daerah untuk mengaktualisasikan peran stimulator yaitu pertama dengan upaya peningkatan penguasaan pasar dengan cara yang paling sederhana yaitu melibatkan pihak pengusaha industri kecil dalam *event* pameran produk unggulan baik di dalam maupun di luar negeri. Kedua adalah penataan tempat usaha melalui penataan outlet-outlet industri kecil termasuk penataan jalur transportasi untuk memudahkan akses konsumen menuju lokasi penjualan produk industri kecil.

e. Koordinator

Sebagai koordinator, pemerintah daerah mempunyai peran untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga bisa melibatkan lembaga-lembaga lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi. Langkah strategis dalam mengaktualisasikan dalam membentuk asosiasi pengusaha industri kecil atau himpunan kelompok usaha.

Selain itu strategi yang bisa diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil menurut Hetifah Sjaifudin (1995:66-75) adalah:

1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui “pemberian modal sementara”.

2) Pengembangan Pemasaran

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi pengusaha kecil. Maka dari itu terdapat 3 cara dalam strategi pengembangan pemasaran, yaitu:

a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar

Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi yang berkaitan dengan pola subkontrak yang lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri secara vertikal. Pola yang subkontrak memberikan manfaat positif bagi pengusaha kecil karena secara ekonomi usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi.

b. Proteksi Pasar

Bentuk proteksi dalam hal ini melalui konsumsi sekitar 10% dari total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk badan usaha kecil.

c. Menggeser Struktur Pasar Monopoli Menjadi Bersaing

Langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini adalah pasar. Modal bukanlah kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan disini antara lain penghapusan proteksi *infant industry* mendorong tercapainya iklim persaingan dan orientasi lembaga koperasi ke arah bisnis dalam hal ini fungsi kontrol sangat diperlukan.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem permagangan pada pusat-pusat penelitian dan pengembangan mengembangkan SDM dan teknologi seperti melakukan pembinaan terhadap industri kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara rutin dan berkelanjutan harus ada dalam setiap program kerja pemerintah.

4) Strategi Pengaturan Dan Pengendalian

a) Pengaturan Perijinan

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada 4 jenis perijinan yang harus dipenuhi antara lain: ijin tempat usaha (kelayakan, lokasi serta dampak terhadap lingkungan), ijin usaha industri serta ijin perdagangan. Pada lokasi tertentu usaha kecil tidak wajib memiliki SITU, namun sertifikasi masih tetap harus dipenuhi antara lain melalui Surat Bebas Ijin Tempat Usaha (SBITU) untuk usaha kecil yang terdeteksi di LIU (Lokasi Industri Usaha) serta surat tanda pendaftaran industri kecil untuk sentra-sentra produksi.

b) **Perencanaan Tata Ruang**

Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan usaha kecil melalui: melibatkan kepentingan usaha kecil dalam perencanaan kota, proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, pengaturan sungguh- sungguh terhadap peran dan fungsi usaha kecil tersebut bagi lingkungan masyarakat kota.

c) **Fungsi Kelembagaan**

Fungsi kelembagaan terkait pengembangan usaha kecil secara terpadu dan berjangka panjang harus lebih diefektifkan dengan cara: Bidang pembinaan, pengawasan dan pengembangan industri kecil dilebur ke dalam struktur vertikal memberi peluang bagi swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pengembangan usaha kecil secara bersama-sama.

4. Keunggulan Dan Kelemahan Industri Kecil

Menurut Broom dan Longenecker seperti yang dikutip oleh Irianto (1996:25) ada tiga kekuatan yang dimiliki industri kecil khususnya dalam menghadapi kompetisi dengan perusahaan lain, yakni:

- a. *Knowledge of customer and markets* (informasi dari pelanggan dan pasar)
- b. *Product and geographic specialization* (spesialisasi hasil produksi dan posisi geografis)
- c. *Flexibility in management* (manajemen yang fleksibel)

Senada dengan hal tersebut Scarborough seperti yang dikutip oleh Irianto (1996:26), menyatakan beberapa faktor utama sebagai pendukung kesuksesan dan keuntungan usaha kecil seperti berikut ini

- a. *Greater flexibility* (lebih fleksibel)
- b. *More personal attention to customers and employees* (perhatian yang lebih bersifat pribadi kepada pelanggan dan pegawai)
- c. *Lower fixed cost* (biaya yang rendah)
- d. *Greater entrepreneurial and innovative fervor* (lebih mempunyai semangat berwirausaha dan berinovasi)
- e. *Greater motivation of the owners* (motivasi yang lebih dari pemilik)

Menurut Hanafi dan Hardjanto dalam bukunya *Entrepreneurship Kewirausahaan* (2006:40) industri kecil memiliki kekuatan atau kelebihan sendiri yaitu:

- a. Memiliki kebebasan untuk bertindak bila ada perubahan. Misalnya, perubahan produksi baru, teknologi baru dan perubahan mesin baru, usaha kecil bisa bertindak dengan cepat menyesuaikan dengan keadaan yang berubah tersebut
- b. Fleksibel. Perusahaan kecil sangat luwes, ia dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. Bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran produk usaha kecil biasanya menggunakan sumber-sumber setempat yang bersifat lokal
- c. Tidak mudah goncang. Karena bahan baku dan sumber daya lainnya kebanyakan lokal, maka perusahaan kecil tidak rentan terhadap fluktuasi bahan baku impor
- d. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja cukup tinggi.

Sedangkan dibalik keuntungan, industri kecil juga mempunyai sejumlah kelemahan. Menurut Scarborough seperti yang dikutip oleh Irianto (1996:27), kelemahan industri kecil yaitu:

- a. *Poor management* (manajemen yang buruk)
- b. *Inanequate financing* (kekurangan dalam pembiayaan)

Broom dan Longenecker seperti yang dikutip oleh Irianto (1996:27) menambahkan pendapat dari Scarborough mengenai kelemahan industri kecil yaitu:

- a. *Lack of management skills and depth* (kurangnya keahlian dan kedalaman pengetahuan tentang manajemen)
- b. *Personal lack and misuse of time* (penyalahgunaan waktu untuk kepentingan pribadi)
- c. *Financing* (pembiayaan)

Permasalahan yang dialami oleh industri kecil menurut Juwaini (1996:15) antara lain:

- a. Kelemahan dalam mempunyai peluang (akses) pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- c. Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen.
- d. Keterbatasan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi.
- e. Keterbatasan dalam jaringan udasah dan kerjasama usahanya.

f. Kelemahan dalam mentalitas usaha.

Sedangkan menurut Hanafi dan Hardjanto (2006:42) kendala/tantangan yang sering dihadapi oleh kebanyakan industri kecil adalah sebagai berikut:

3. Kelemahan struktural, yaitu dalam struktur perusahaan semisal kelemahan manajemen, pengendalian mutu, penguasaan teknologi, permodalan dan terbatasnya akses pasar
4. Kelemahan kultural, yaitu seperti informasi peluang, informasi mendapatkan bahan baku dan dinformasi pengembangan produk.

5. Peran Industri Kecil Dalam Pembangunan

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, industri kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Selain itu industri kecil menggunakan teknologi yang sangat sederhana dan bahan baku berasal dari daerah setempat sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah.

Industri kecil mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, industri kecil terbukti masih mampu dan lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Menurut Saleh (1986:5) industri kecil juga memberi peran yang sangat berarti dalam pembangunan perekonomian. Pertama, industri kecil dapat menciptakan

peluang berusaha yang luas dengan pembiayaan yang relatif murah. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tingkat keahlian dan daya dukung permodalan dari pengusaha di negara-negara ASEAN pada umumnya masih rendah. Kedua: industri kecil turut mengambil peranan penting dalam peningkatan dan mobilitas tabungan domestik. Ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa industri kecil cenderung memperoleh modal dari tabungan pengusaha sendiri atau tabungan dari keluarga dan kerabatnya. Ketiga: industri kecil mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang, karena industri kecil menghasilkan produk yang relatif murah dan sederhana, yang biasanya tidak dihasilkan oleh industri besar dan sedang.

Sektor industri telah berperan sebagai penggerak utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan meningkatkan produktifitas masyarakat. Di samping itu pembangunan industri juga berperan menciptakan lapangan usaha serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan serta pemeratakan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Proses industrialisasi juga penting dalam mendukung berlangsungnya perubahan tata nilai masyarakat dan pranata sosial yang lebih dinamis dan berkualitas. Sektor industri telah menyumbang porsi utama dalam pendapatn devisa negara pada porsi yang lebih besar, meningkatkan pendapatan nasional, menyerap tenaga kerja cukup banyak, sementara kondisi sosial dan budaya masyarakat telah menjadi masyarakat industri (laporan pelaksanaan tupoksi depperindag 1997/1998)

Dengan demikian dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan sektor industri kecil dalam pembangunan sangat besar terutama pembangunan perekonomian. Peranan industri kecil yang sangat besar terdapat dalam penyerapan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga menurunkan angka pengangguran dan bisa memutar perekonomian masyarakat.

D. Konsep Keunggulan Kompetitif

Persaingan dalam perdagangan internasional (atau pasar pada umumnya) sangat ditentukan pada keunggulan yang dimiliki atau keunggulan produk yang dihasilkan. Dalam konteks pengembangan keunggulan tersebut, pemerintah daerah mulai mengembangkan konsep produk unggulan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi produk unggulan terutama yang berasal dari industri kecil menengah sebagai proses pengembangan sumber daya lokal dan optimalisasi atas potensi ekonomi daerah. Sebagai suatu strategi pembangunan, pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan, karena dianggap bahwa suatu daerah yang menerapkan pola pembangunan ini relatif lebih “mandiri” dalam pengembangan ekonominya.

Produk unggulan merupakan produk yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah.

Produk unggulan juga merupakan produk yang memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global. Penetapan produk unggulan memerlukan

penentuan kriteria yang dapat membedakan produk unggulan untuk setiap sentra produksi.

Menurut Hamzah, pengembangan kawasan produk unggulan dan peluang pasar, kriteria produk unggulan yaitu:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang besar untuk di ekspor
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu daerah adalah produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor. (<http://dennyhamzah.dosen.narotama.ac.id/files/2011/10/Modul-6-.pdf>)

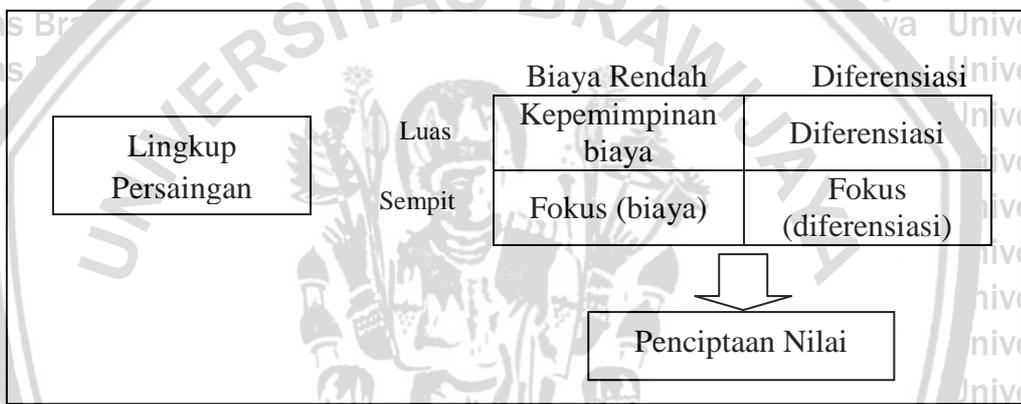
Konsep keunggulan kompetitif muncul karena adanya suatu persaingan dalam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Ketika perusahaan mampu memberikan manfaat yang sama sebagai kompetitor tetapi dengan biaya yang lebih rendah (keunggulan biaya), atau memberikan manfaat yang melebihi orang-orang produk yang bersaing (keunggulan diferensiasi). Jadi, keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai yang superior bagi pelanggan dan keuntungan superior untuk dirinya sendiri (Porter, 1993:10).

Sedangkan menurut Kuncoro (2005:14) mendefinisikan keunggulan kompetitif yaitu suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan

sesuatu lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain.

Perusahaan menggunakan sumber daya dan kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang pada akhirnya menghasilkan penciptaan nilai unggul.

Diagram berikut menggabungkan pandangan berbasis sumber daya dan posisi untuk menggambarkan konsep keunggulan kompetitif:



Sumber: Porter, 1993:11

Gambar 1
Model Keunggulan Kompetitif

Porter menjelaskan pandangan berbasis sumber daya, dalam rangka untuk mengembangkan keunggulan kompetitif perusahaan harus memiliki sumber daya dan kemampuan yang unggul daripada pesaingnya. Tanpa keunggulan ini, para pesaing hanya bisa meniru apa yang perusahaan lakukan dan keuntungan apapun dengan cepat akan menghilang. Sumber daya perusahaan-spesifik aset berguna untuk menciptakan keunggulan biaya atau diferensiasi dan bahwa beberapa pesaing bisa mendapatkan dengan mudah. Berikut ini adalah beberapa contoh sumber daya seperti:

- *Patents and trademarks*
- *Proprietary know*
- *Installed customer base*
- *Reputation of the firm*
- *Brand equity*

Kemampuan merujuk kepada kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif. Sebuah contoh dari kemampuan adalah kemampuan untuk membawa produk ke pasar lebih cepat daripada pesaing. Kemampuan seperti yang tertanam dalam rutinitas organisasi dan tidak mudah didokumentasikan sebagai prosedur dan dengan demikian sulit bagi pesaing untuk meniru. Sumber daya dan kemampuan perusahaan bersama-sama membentuk kompetensi yang khas. Kompetensi ini memungkinkan inovasi, efisiensi, kualitas, dan respon pelanggan, yang semuanya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kepemimpinan biaya atau keunggulan diferensiasi.

Strategi Kepemimpinan Biaya (*cost leadership*), digunakan apabila organisasi ingin menjadi pemimpin pasar berbasis biaya rendah dengan basis pelanggan luas.

Kepemimpinan biaya secara intuitif strategi paling mudah untuk memahami.

Biasanya, pemimpin biaya menjual produk dasar atau komoditas dengan mengerucutkan keuntungan biaya skala dan mutlak sementara produk mungkin relatif tidak canggih.

Strategi Keunggulan Diferensiasi (*Differentiation*), digunakan apabila perusahaan ingin bersaing dengan pesaingnya dalam hal keunikan produk dan jasa yang ditawarkan. perusahaan berusaha untuk menjadi pemain terbaik dalam pengelompokan industri sepanjang beberapa dimensi atau dimensi dari produk atau layanan selain biaya. Atribut dari produk/jasa harus sesuatu yang mayoritas

pelanggan anggap sebagai penting, dan perusahaan harus memposisikan diri yang unik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Strategi Fokus, digunakan apabila perusahaan ingin melayani kebutuhan spesifik ceruk pasar (*market niche*). Strategi ini tidak didasarkan pada pemilihan atribut yang diinginkan untuk produk atau layanan di seluruh industri, tetapi merupakan pengelompokan pada pemilihan segmen tertentu atau kelompok, dalam industri secara keseluruhan, yang akan ditargetkan, yaitu perusahaan terlihat untuk mengeksploitasi ceruk pasar. Sebuah perusahaan yang strategis keunggulan terletak pada fokus akan memilih niche dan, setelah menemukannya, akan menyesuaikan strategi khusus untuk melayani kebutuhan kelompok klien tertentu.

Penciptaan Nilai, Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan serangkaian kegiatan yang Porter diidentifikasi sebagai rantai nilai. Selain perusahaan sendiri nilai-menciptakan kegiatan, perusahaan beroperasi dalam sistem nilai kegiatan vertikal termasuk orang-orang dari pemasok hulu dan anggota saluran hilir. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus melakukan satu atau lebih kegiatan penciptaan nilai dengan cara yang menciptakan nilai lebih secara keseluruhan daripada pesaing. Nilai unggul diciptakan melalui biaya lebih rendah atau yang berbeda kepada konsumen (diferensiasi).

(<http://www.quickmba.com/strategy/competitive-advantage>)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah bertujuan untuk menggambarkan/mendeskripsikan, memaparkan berbagai fenomena sosial yang terjadi pada objek penelitian secara sistematis, faktual untuk dianalisis dengan cermat dan mendalam. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan data-data non-statistik dan terbatas pada usaha-usaha yang mengungkap permasalahan sebenarnya.

Menurut Kirk dan Miller seperti yang dikutip oleh Moleong (2000:3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini hanya akan menggambarkan dan menganalisa fenomena-fenomena dan fakta-fakta.

Adapun karakteristik penelitian kualitatif menurut Moleong (2000:4-8) adalah:

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai instrument
3. Metode kalitatif
4. Analisa secara induktif
5. Teori dasar
6. Deskriptif

Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Blitar dalam rangka memberdayakan industri kecil kendang sentul. Dan menyangkut pula faktor-faktor lain yang mendukung maupun menghambat proses pemberdayaan itu sendiri.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai pusat yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh, batas menentukan kenyataan guna mempertajam fokus dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus (Moleong, 2000:10).

Adapun Fokus dalam penelitian ini adalah

1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Blitar dalam memberdayakan industri kecil kendang sentul sebagai salah satu produk unggulan, yang dilihat dari:

- a. Government Provision (Pembinaan industri kecil dalam pembimbingan dan pelatihan sumber daya manusia dalam hal teknologi dan keterampilan)
- b. Subsidi (Pemberian Bantuan)

- c. Regulasi (Pengaturan dan pengendalian industri dalam perijinan)
- d. Stimulator (Akses informasi tentang promosi dan pemasaran)
- e. Koordinator (Kemitraan antara industri mikro kecil menengah dan swasta)

2. Faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Blitar maupun oleh pelaku usaha industri kecil kendang sentul.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang disebut dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah kota Blitar. Alasan peneliti memilih kota Blitar sebagai lokasi penelitian karena kota Blitar merupakan kota kecil yang menuju perkembangan di berbagai bidang pembangunan salah satunya pembangunan di bidang perekonomian. Selain itu kota Blitar memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang dapat di maksimalkan untuk terwujudnya pembangunan di bidang ekonomi. Untuk itu perlu diadakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat melalui industri-industri kecil yang sudah ada di kota Blitar.

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi situs penelitian ini Adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Blitar yang mana dinas ini mengurus tentang

pemberdayaan industri kecil yang ada di kota Blitar. Serta salah satu sentra industri kecil kendang sentul yang ada di Kecamatan Kepanjenkidul Kelurahan Tanggung kota Blitar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data-data yang berupa fakta-fakta dan bagan yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang aktual yang didapat dari penelitian dilapangan, yang diperoleh peneliti langsung dari subjek atau sumber penelitian, dalam hal ini data primernya dilakukan dengan wawancara pada:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Blitar (kepala bagian perindustrian dan kepala seksi yang berhubungan langsung dengan apa yang peneliti ingin diteliti)
- b. Pelaku usaha industri kecil kendang sentul/ jimbe di kota Blitar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung biasanya data itu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar penelitian.

Dalam penelitian ini data sekundernya adalah

- a. Literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Blitar.
- b. Peristiwa, yaitu kejadian, kegiatan, dan keadaan di tempat penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan data yang penting dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, tepat dan akurat dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara lebih lanjut dan memperjelas data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan bantuan panduan wawancara (*interview guide*).

2. Observasi

Cara untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen, baik berupa buku, laporan, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen tertulis dari instansi yang menjadi lokasi penelitian dan dari pendapat-pendapat para ahli berbagai tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri ataupun dengan

bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama. Berikut instrumen penelitiannya:

1. Instrumen untuk wawancara adalah peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Serta terjun langsung untuk memperoleh data langsung dari narasumber dengan bantuan panduan wawancara (*interview guide*). Tujuannya agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik yang telah ditetapkan.
2. Instrumen dalam observasi adalah catatan lapangan, yaitu catatan sistematis yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian dilaksanakan. Tujuannya agar peneliti terhindar dari kesalahan akan hal yang diamati.
3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah penulis sendiri dengan mempergunakan alat tulis, foto kopi dan peralatan lain yang dapat dipakai untuk hal tersebut.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengkoordinasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja. (Moleong, 2000:103). Sedangkan Bogdan Dan Biklen mendefinisikan bahwa analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan

secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan tersebut agar dapat di presentasikan semuanya kepada orang lain.

Adapun menurut Miles dan Huberman (1992:20) analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

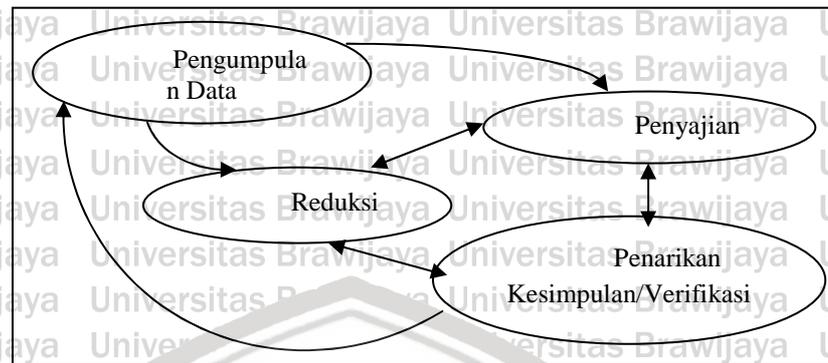
Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang terdapat di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, menyortir, dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Merupakan akhir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh di lapangan agar data tersebut *valid*. Kesimpulan dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.



Sumber: Miles & Huberman (1992:26)

Gambar II
Analisis Model Interaktif

Pada saat penelitian data dari pernyataan para nara sumber yang di dapat peneliti sangat berfariatif. Untuk itu selanjutnya peneliti mereduksi data dengan memilah data yang pokok-pokok saja, agar penelitian selanjutnya dapat di laksanakan dengan lebih fokus dan terarah pada data-data yang penting. Tahap selanjutnya peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang dapat lebih jelas dipahami. Setelah data-data di sajikan kemudian di analisis menggunakan teori yang di gunakan peneliti, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Blitar

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Tepatnya terletak sekitar ± 167 km sebelah selatan Kota Surabaya, ibu Kota propinsi Jawa Timur. Kota ini terletak pada koordinat $112^{\circ}14'$ - $112^{\circ}28'$ bujur timur $8^{\circ}2'$ - $8^{\circ}8'$ lintang selatan dan suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C - 34°C . Kondisi seperti ini menjadikan Kota Blitar sebagai sebuah daerah yang nyaman untuk dijadikan tempat hunian dan peristirahatan.

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator secara legal formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar. Memang ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai Kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar. Kota Blitar dapat dikatakan sebagai kota yang miskin potensi, karena secara ekonomis tidak memiliki sumber daya alam galian, mineral maupun hasil hutan dan kekayaan alam lainnya. Dengan

demikian untuk melaksanakan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di era otonomi daerah, Kota Blitar harus mampu melakukan berbagai langkah terobosan melalui pengembangan dan pembangunan sumber daya lainnya baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya buatan, dimana sistem dan manajemen pemerintahan adalah termasuk di dalamnya.

Membicarakan Kota Blitar, tidaklah lengkap kalau tidak menceritakan semangat perjuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus mengelola serta menjiwai seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kota ini. Di Kota ini tempat disemayamkan Bung Karno, Sang Proklamator, Presiden Pertama RI, ideolog dan pemikir besar dunia yang dikagumi baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi Bangsa Indonesia, dimana sebelum dicituskannya Proklamasi ditempat ini telah diserukan kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Sang Merah Putih yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA oleh Sudanco Supriyadi.

Masyarakat Kota Blitar sangat bangga sebagai pewaris Aryo Blitar, pewaris Soeprijadi dan pewaris Soekarno, yang nasionalistik-patriotik. Pemerintah Kota Blitar sadar akan hal ini, semangat itu dilestarikan dan dikobarkan, dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ke depan. Tidak heran kalau akronim PATRIA dipilih sebagai semboyan. Kata PATRIA ini disusun dari kata PETA, yang diambil dari legenda Soedanco Soeprijadi yang memimpin pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada Jaman Penjajahan Jepang, serta dari kata Tertib, Rapi, Indah, dan Aman. Selain itu, kata PATRIA memang

sengaja dipilih karena didalamnya mengandung makna "Cinta tanah air".

Sehingga dengan menyebut kata PATRIA orang akan terbayang kobaran

semangat nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh para patriot bangsa yang ada di Kota Blitar melalui roh perjuangannya masing-masing.

a) Sejarah Singkat Berdirinya Kota Blitar

Penjajahan di Blitar berlangsung dalam suasana serba menyedihkan karena memakan banyak korban, baik nyawa maupun harta dan akhirnya rakyat Blitar pun kemudian bersatu padu dan bahu membahu melakukan berbagai bentuk perlawanan kepada Belanda. Dan untuk meredam perlawanan rakyat Blitar, pada tahun 1906 pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah *Staatsblad van Nederlandche Indie* Tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan *Gemeente* Blitar. Momentum pembentukan *Gemeente* Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa Kota lain di Indonesia antara lain Kota Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang Semarang, Madioen, Blitar, Malang, Surabaya dan Pasoeroean.

Pada tahun 1928, Kota Blitar pernah menjadi Kota Karisidenan dengan nama "Residen Blitar", dan berdasarkan Stb. Tahun 1928 Nomor 497 *Gemeente* Blitar ditetapkan kembali. Pada tahun 1930, Kotaparaja Blitar sudah memiliki lambang daerah sendiri. Lambang itu bergambar sebuah Gunung dan Candi Penataran, dengan latar belakang gambar berwarna kuning kecoklatan di belakang gambar Gunung yang diyakini menggambarkan Gunung Kelud dan berwarna biru

di belakang gambar Candi Penataran. Alasan yang mendasarinya adalah Blitar selama ini identik dengan Candi Penataran dan Gunung Kelud. Sehingga, tanpa melihat kondisi geografis, lambang Kotapraja Blitar pun mengikuti identitas itu.

Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Kota Blitar dan istilah *Gementee* Blitar berubah menjadi “Blitar Shi”, yang diperkuat dengan produk hukum yang bernama Osamu Seerai. Di masa ini, penjajah Jepang menggunakan isu sebagai saudara tua bangsa Indonesia, Kota Blitar pun masih belum berhenti dari pergolakan. Bukti yang paling hebat, adalah pemberontakan PETA Blitar, yang dipimpin Soedanco Suprijadi. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 itu, merupakan perlawanan yang paling dahsyat atas kependudukan Jepang di Indonesia yang dipicu dari rasa empati serta kepedulian para tentara PETA atas siksaan baik lahir maupun batin yang dialami rakyat Indonesia oleh penjajah Jepang.

Konon kabarnya, menurut Cindy Adams di dalam otobiografi Bung Karno, pada tanggal 14 Februari 1945 itu pula, Soeprijadi dan kawan-kawan sebelum melakukan pemberontakan, sempat berdiskusi tentang rencana pemberontakan ini dengan Ir. Soekarno yang ketika itu tengah berkunjung ke Ndalem Gebang. Namun Soekarno ketika itu tidak memberikan dukungan secara nyata karena Soekarno beranggapan lebih penting untuk mempertahankan eksistensi pasukan PETA sebagai salah satu komponen penting perjuangan memperebutkan kemerdekaan.

Di luar pemberontakan yang fenomenal itu, untuk kali pertamanya di bumi pertiwi ini Sang Saka Merah Putih berkibar. Adalah Partohardjono, salah seorang

anggota pasukan Suprijadi, yang mengibarkan Sang Merah Putih di tiang bendera yang berada di seberang asrama PETA. Kini tiang bendera itu berada di dalam kompleks TMP Raden Widjaya, yang dikenal pula sebagai Monumen Potlot.

Pemberontakan PETA ini walaupun dari sisi kejadiannya terlihat kurang efektif karena hanya berlangsung dalam beberapa jam dan mengakibatkan tertangkapnya hampir seluruh anggota pasukan PETA yang memberontak, kecuali Suprijadi, namun dari sisi dampak yang ditimbulkan peristiwa ini telah mampu membuka mata dunia dan menggoreskan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia karena peristiwa tersebut merupakan satu-satunya pemberontakan yang dilakukan oleh tentara didikan Jepang.

Beberapa saat setelah pemberontakan PETA Blitar, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hata memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Kota Blitar pun menyambutnya dengan gembira. Sebab, hal inilah yang ditunggu-tunggu dan justru itulah yang sebetulnya menjadi cita-cita perjuangan warga Kota Blitar selama ini. Karena itu, rakyat Kota Blitar segera mengikrarkan diri berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sebagai bukti keabsahan keberadaan Kota Blitar dalam Republik Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang perubahan nama "Blitar Shi" menjadi "Kota Blitar".

b) Kondisi Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur

yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km² terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km²
- b. Kecamatan Kepanjenkidul luas 10,50 km²
- c. Kecamatan Sananwetan luas 12,15 km²

Karena letaknya di selatan lereng Gunung Kelud, Kota Blitar juga memiliki aliran sungai lahar yang membujur dari utara ke selatan sepanjang ±7.84 km. tinggi Kota Blitar 156 m diatas permukaan air laut dengan suhu rata-rata 29 derajat celcius. Sehingga Kota Blitar menjadi pilihan tempat tinggal yang nyaman.

Batas-batas wilayahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- b. Sebelah selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- c. Sebelah timur: Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- d. Sebelah barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

c) Kondisi Demografi

Kota Blitar terletak pada ketinggian 156 m dari permukaan laut, pada koordinat 112°14'-112°28' bujur timur 8°2'-8°8' lintang selatan dan memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C-34°C. karena Kota Blitar berada di kaki

Gunung Kelud dengan jarak 167 km arah tenggara dari ibu Kota propinsi Surabaya. Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi di luar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

d) Keadaan Topografi

Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m dengan tingkat kemiringan 2° sampai 15°, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Dilihat dari topografi wilayah Kota Blitar masih termasuk dataran rendah serta memiliki tekstur tanah yang subur untuk mendukung usaha pertanian.

e) Pembagian Administratif

Secara administratif Kota Blitar dibagi ke dalam 3 Kecamatan dengan 20 Kelurahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1
Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Blitar Tahun 2010**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Sukorejo	1. Tlumpu 2. Karang Sari 3. Turi

		4. Blitar 5. Sukorejo 6. Pakunden 7. Tanjungsari
2.	Kecamatan Kepanjenkidul	1. Kepanjenkidul 2. Kepanjenlor 3. Kauman 4. Bendo 5. Tanggung 6. Sentul 7. Ngadirejo
3.	Kecamatan Sananwetan	1. Rembang 2. Klampok 3. Plosokerep 4. Karangtengah 5. Sananwetan 6. Bendogerit

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar: 2010

f) Penduduk

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Blitar sementara adalah 132.018 orang, yang terdiri atas 65.348 laki-laki dan 66.670 perempuan. Angka ini meningkat 13.133 jiwa dibanding jumlah penduduk hasil SP2000 sejumlah 119.372 jiwa. Distribusi/persebaran penduduk di Kota Blitar menunjukkan bahwa Kecamatan Sananwetan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (49.236 jiwa) disusul Kecamatan Sukorejo (44.135 jiwa), sementara Kecamatan Kepanjenkidul menjadi Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit (38.647 jiwa).

Dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2000, distribusi penduduk dimasing-masing kecamatan tidak mengalami pergeseran yang cukup tajam. Dengan luas wilayah 32,57 Km², kepadatan penduduk Kota Blitar pada tahun

2010 sebesar 4.053 jiwa/Km², dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, yang tertinggi adalah kecamatan Sukorejo sebanyak 4.449 jiwa/Km², diikuti Sananwetan sebanyak 4.052 jiwa/j. Km², dan yang terakhir kecamatan Kepanjenkidul sejumlah 3.681 jiwa/ Km².

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + perempuan	Sex ratio
Sukorejo	21.828	22.307	44.135	97,85
Kepanjenkidul	18.963	19.684	38.647	96,34
Sananwetan	24.557	24.679	49.236	99,51
Kota Blitar	65.348	66.670	132.018	98,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar: 2010

Tabel 3
Kepadatan Penduduk Kota Blitar Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan penduduk (orang/Km ²)
Sukorejo	44.135	9,92	4.449
Kepanjenkidul	38.647	10,50	3.681
Sananwetan	49.236	12,15	4.052
Kota Blitar	132.018	32,57	4.053

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar: 2010

2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

a) Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah maka, pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Keputusan WaliKota Blitar nomor 46 tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai dinas daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Disperindag Daerah Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Disperindag daerah Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan secara oparesional sebagian kewenangan pemerintah daerah dibidang perindustrian dan perdagangan
2. Disperindag daerah Kota Blitar mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijaksanaan tehnis penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian dan perdagangan
 - b. Pelaksanaan pemberian ijin
 - c. Pelaksanaan penyediaan, penyaluran barang, jasa dan promosi
 - d. Pelaksanaan kemetrolgian dan perlindungan konsumen
 - e. Peningkatan pendapatan asli daerah
 - f. Penyusunan evaluasi dan laporan

b) **Visi Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar**

Visi merupakan cara pandang sekaligus kondisi akhir yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu dan berjaitan dengan pandangan kedepan dan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan dapat berkearya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Berdasarkan kondisi daerah saat ini, prediksi atau perkiraan yang dihadapi serta memperhatikan isu strategis yang dimiliki oleh Kota Blitar maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah Kota Blitar tahun 2011-2015 adalah:

“BERKEMBANGNYA IKM SERTA MENINGKATNYA IKLIM PERDAGANGAN DAN PEMASARAN YANG KONDUSIF DI TAHUN 2015”

Dengan penetapan visi Disperindag Daerah Kota Blitar sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi dari potensi, kendala serta kemauan semua pihak untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berkembangnya sektor ekonomi riil, penambahan lapangan pekerjaan baru pada akhirnya dapat pula mendukung terwujudnya visi Kota Blitar yaitu APBD Pro Rakyat

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan misi yang ditetapkan.

Dengan demikian dapat terwujud apabila instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas, sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan memperhatikan keterpengaruh dan korelasi eksternal dan internal serta upaya menyelaraskan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya aparatur dan mekanisme organisasi yang dimiliki maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa
2. Pemantapan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri serta kualitas SDM
3. Mengoptimalkan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

c) Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka dinas perindustrian dan perdagangan Kota Blitar untuk masa tahun 2011-2015 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa
2. Pengembangan sistem dan jaringan informasi perdagangan
3. Fasilitasi perijinan pengembangan usaha
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri serta pemanfaatan sumber daya.
5. Terfasilitasinya kerja sama kemitraan industri mikro, kecil, dan menengah dengan swasta serta kemudahan perijinan swasta.

6. Meningkatnya dan memperluas jaringan pemasaran.

d) Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

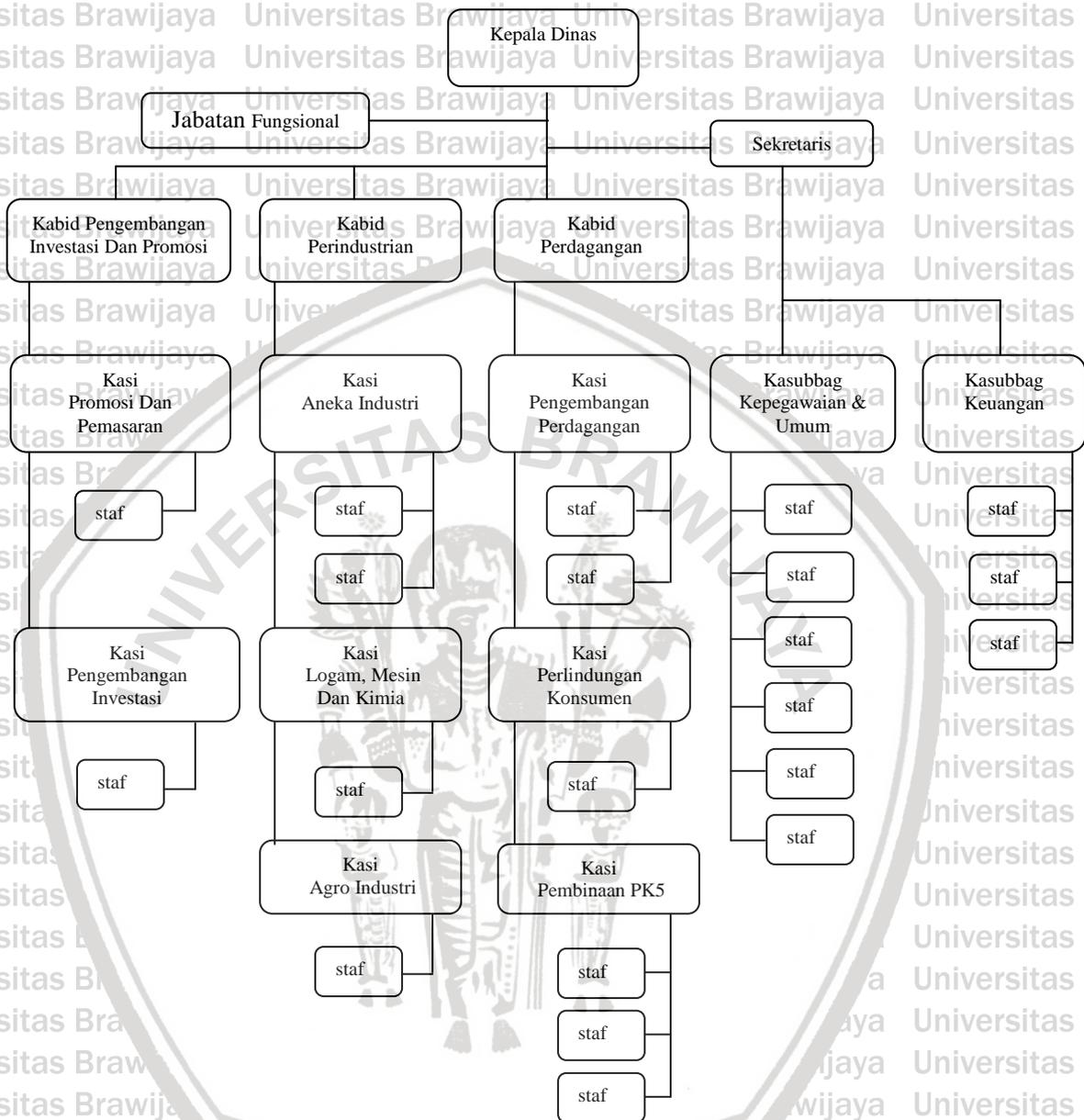
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Disperindag daerah Kota Blitar adalah:

1. Terciptanya perlindungan konsumen
2. Meningkatkannya pengawasan/pemantauan barang beredar
3. Teridentifikasinya pertumbuhan PKL dan para pelaku usaha
4. Meningkatnya pemasaran hasil produk dan berkembangnya usaha para pelaku usaha.
5. Meningkatnya jumlah investasi dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk.
6. Terpenuhinya sarana untuk IKM untuk memperkuat jaringan kluster industri.
7. Meningkatnya kualitas SDM dan produk-produk IKM
8. Meningkatnya akses dan peluang pasar produk IKM
9. Meningkatnya gelas potensi produk IKM

e) **Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar**

Susunan organisasi dinas Disperindag Daerah Kota Blitar terdiri dari kepala dinas, 1 sekretaris dan 3 kepala bagian yaitu bidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang pengembangan investasi dan promosi. Formulasi ini mencerminkan hubungan kerjas sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar agar capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut gambar tentang struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar:





Sumber: Renstra Disperindag Kota Blitar tahun 2011-2015

Gambar III
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Kota Blitar

f) Tugas Pokok Dan Fungsi

Adapun tugas masing-masing bidang dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya, dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan kesekretariatan. Misalnya: koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai, perencanaan program serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memperlancar mekanisme organisasi dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengoordinasian internal dan eksternal dalam rangka memperlancar penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi.
- b. Pengelolaan urusan dalam (rumah tangga) dan tata usaha.
- c. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan.

- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
- e. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan advokasi administrasi kepegawaian
- f. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan.
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan.
- h. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan administrasi program
- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang.

3. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas pokok mengelola urusan rumah tangga yang mencakup pengelolaan sarana prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas, pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sub bagian umum mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengelolaan administrasi umum perkantoran yang mencakup urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan.
- b. Pengelolaan, piñata usaha dan pengendalian pemanfaatan sarana prasarana serta perlengkapan kantor.

- c. Penyelenggaraan keamanan kantor yang mencakup keamanan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor maupun keamanan kantor selama sebelum pada saat dan sesudah jam kerja.
- d. Penyelenggaraan dan fasilitasi rapat-rapat dinas baik yang diselenggarakan oleh maupun rapat-rapat dinas yang harus diikuti oleh dinas.
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat dan pension pegawai.

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

Mempunyai tugas pokok mengelola urusan keuangan yang mencakup kegiatan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan rencana program tahunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit kerja.
- b. Pengkoordinasian kegiatan piñata usaha dan pertanggungjawaban keuangan seluruh unit kerja.
- c. Pengelolaan urusan gaji pegawai.
- d. Penyiapan usulan pejabat pengelolaan keuangan
- e. Penyusunan neraca
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan

g. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan seluruh unit kerja.

h. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana kinerja tahunan.

i. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dan pelaksanaan kegiatan insidental.

j. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan insidental.

k. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan serta kegiatan insidental.

5. Bidang Perindustrian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, aspek manajemen, permodalan dan pemasaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perindustrian mempunyai fungsi antara lain:

a. Pengelolaan dan perumusan bahan bimbingan teknis, penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri.

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran dibidang industri kecil.

- c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil produksi, penetapan standart, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dibidang industri.
- e. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri.
- f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan, penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan dampak industri.

6. Seksi Aneka Industri

Mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan dan pengembangan, manajemen usaha industri serta analisis iklim usaha, peningkatan kerjasama dibidang dunia usaha aneka insdustri melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi aneka industri mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengumpulan bahan dan penyusuna petunjuk bimbingan teknis dan pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang aneka industri.
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran di bidang industri kecil.

c. Penyiapan bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil penerapan standart dan pengawasan mutu.

d. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembekalan, pengembangan industri dan HAKI.

e. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri.

7. Seksi Logam, Mesin Dan Kimia

Mempunyai tugas pokok menyusun bimbingan teknis rencana kerja kegiatan pembinaan, pengembangan bidang usaha industri dan sarana industri, pemantauan, penanggulangan, pencegahan pencemaran laingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi logam, mesin, dan kimia mempunyai fungsi antara lain:

a. Pengumpulan bahan dan penyusunan bahan petunjuk bimbingan teknis penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri logam, mesin, dan kimia.

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan evaluasi sarana, usaha dan produksi serta aspek perijinan, manajemen, permodalan, dan pemasaran dibidang industri kecil.

c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil penerapan standart dan pengawasan mutu.

d. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan, penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan.

8. Seksi Agro Industri

Mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja kegiatan pembinaan dan pengembangan, usaha agro industri serta analisis perencanaan, pemanfaatan bahan baku agro industri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi agro industri mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengumpulan bahan dan penyusunan bahan bimbingan teknis penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang agro industri.
- b. Perencanaan analisis penyediaan, pemanfaatan bahan baku agro industri.
- c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta aspek manajemen permodalan, pemasaran di bidang industri kecil.
- d. Penyiapan pelatihan dan bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil penerapan standart dan pengawasan mutu.

9. Bidang Perdagangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan bimbingan teknis terhadap pengembangan usaha dan sarana perdagangan, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran, perlindungan konsumen, sosialisasi pendaftaran perusahaan, melaksanakan pembinaan dan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh PKL serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perdagangan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan, persaingan usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan.
- b. Pembinaan kepada pedagang non formal/pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dalam rangka bimbingan manajemen, pemasaran, pengelolaan usaha, fasilitasi bantuan modal, dan sarana usaha.
- c. Penyiapan pembinaan dan pengembangan kerjasama pedagang kecil menengah, besar dalam rangka kemitraan.
- d. Penyiapan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi produksi dalam negeri.
- e. Penyiapan pembinaan perlindungan terhadap barang-barang yang beredar dipasaran meliputi barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan (UTTP).
- f. Penyusunan bahan pembinaan dan penyiapan persyaratan perijinan, pendaftaran perusahaan dibidang perdagangan.
- g. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pemungutan retribusi kios diluar pasar dan retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh

PKL.

10. Seksi Pembinaan PKL

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi mengenai perkembangan PKL, menyiapkan bimbingan teknis

pembinaan, penataan dan pemetaan lokasi PKL serta pelaksanaan pemungutan retribusinya, menerima tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi pembinaan PKL mempunyai fungsi antara lain:

- a. Menyusun bahn pedoman teknis pembinaan, penataan, pemetaan PKL.
- b. Melaksanakan pemungutan retribusi kios diluar pasar dan retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh PKL.
- c. Melaksanakan monitoring dan pengawasan perkembangan PKL
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan PKL
- e. Melaksanakan penyetoran hasil pungutan retribusi kios dan pemakaian kekayaan daerah ke kas daerah.
- f. Membuat laporan pembukuan retribusi dan pemakaian benda berharga sebagai alat bukti pemungutan.

11. Seksi Pengembangan Perdagangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi mengenai perkembangan produksi, kebutuhan, produsen dan harga barang, jasa dalam rangka pengendalian inflasi di daerah serta penyiapan bimbingan teknis pembinaan pengembangan usaha sarana perdagangan dan bahan kajian perijinan dalam pengendalian dampak pencemaran lingkungan usaha perdagangan dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi pengembangan perdagangan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan, persaingan usaha, melaksanakan monitoring dan pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha dibidang pengadaan dan penyaluran barang-barang strategis lainnya.
- b. Pembinaan pasar dan pendaftaran pergudangan.
- c. Penyiapan sarana dan melakukan pembinaan usaha perdagangan lainnua dalam rangka pengendalian pencemaran dampak lingkungan.
- d. Penyiapan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi produksi dalam negeri.
- e. Pembinaan kepada pedangan non formal/perdagangan golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dalam rangka bimbingan manajemen, pemasaran, pengelolaan usaha, bantuan modal dan sarana usaha.
- f. Penyiapan pembinaan dan pengembangan kerja sama pedagang kecil, menengah dan besar dalam rangka kemitraan.
- g. Penyusunan pedoman teknis pembinaan dan penyiapan bahan perijinan, pendaftaran perusahaan mupun jenis kegiatan lainnya dalam mendukung pengembangan usaha di bidang perdagangan.

12. Seksi Perlindungan Konsumen

Mempunyai tugas pokok menghimpun, mengelola, menyajikan dan memberikan salinan daftar perusahaan kepada dunia usaha, melaksanakan

penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan wajib daftar perusahaan, fasilitasi perlindungan konsumen.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi perlindungan konsumen mempunyai fungsi antara lain:

- a. Persiapan dan penyajian buku daftar perusahaan maupun informasi lainnya di bidang pendaftaran perusahaan kepada pihak yang memerlukan serta menyimpan dan memelihara data dan arsip daftar perusahaan.
- b. Pendataan dan penyuluhan, pengawasan, penyidikan dalam rangka pembinaan wajib daftar perusahaan bekerja sama dengan instansi terkait.
- c. Penyampaian laporan secara berkala penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.
- d. Pengawasan terhadap barang-barang dipasaran yang berkaitan dengan standaisasi barang, keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan modal dalam rangka perlindungan konsumen.
- e. Pengawasan penggunaan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya serta mengawasi barang dalam keadaan terbungkus.
- f. Pelaksanaan analisa, memeriksa dan menguji data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang berkaitan dengan kemetrologian.
- g. Pemberian penyuluhan dan informasi data mutu produk perusahaan kepada masyarakat

13. Bidang Pengembangan Investasi dan Promosi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian pengembangan unit usaha serta merencanakan bahan kajian perijinan guna mendorong pertumbuhan dunia usaha, dengan memperkenalkan hasil-hasil produk dalam skala daerah maupun nasional serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pengembangan investasi dan promosi mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengeolahan dan perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan investasi perdagangan.
- b. Pelaksanaan kajian investasi bidang perdagangan dan perindustrian dalam rangka strategi pembangunan Kota
- c. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perkembangan investasi bidang perdagangan dan perindustrian.
- d. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan, perumusan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian promosi dan informasi.
- e. Pempersiapan, pelaksanaan kegiatan promosi di dalam maupun di luar negeri.

14. Seksi Pengembangan Investasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pembinaan investasi di bidang perindustrian dan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi perlindungan konsumen mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengumpulan, pengolahan dan perencanaan bahan kajian pengawasan investasi bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Pelaksanaan kasian investasi dalam rangka strategi pembangunan Kota
- c. Pembinaan hubungan kerja sama dengan swasta serta lembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan investasi
- d. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang investasi dan pemasaran kepada industri.

15. Seksi Promosi dan Pemasaran

Mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan tehnik perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian promosi dan informasi serta melaksanakan pemanfaatan sistem teknologi informasi pemasaran di daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi promosi dan pemasaran mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan bimbingan tehnik perencanaan, pengawasan, dan pengendalian promosi.
- b. Persiapan dan pengusulan kegiatan pameran dan promosi serta penyampaian informasi berdagang dan industri baik lokal, nasional dan internasional.
- c. Pelaksanaan pameran industri, perdagangan, pengusaha kecil dan menengah.

- d. Penyampaian informasi dan hasil teknologi industri dengan media liflet, katalog, spanduk, webside, papan sarana promosi.
- e. Pembinaan hubungan kerja sama dengan swasta serta lembaga asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi.

g) Data Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar

a. Data Pegawai Menurut Golongan

**Tabel 4
Data Pegawai Menurut Golongan Tahun 2012**

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	4 orang
	Pembina (IV/a)	1 orang
2.	Penata Tk. I (III/d)	7 orang
	Penata (III/c)	1 orang
	Penata Muda Tk.I (III/b)	2 orang
	Penata Muda (III/a)	5 orang
3.	Pengatur Tk.I (II/d)	-
	Pengatur (II/c)	2 orang
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	10 orang
4.	Juru Tk.I (I/d)	-
	Juru (I/c)	1 orang
	Juru Muda Tk.I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
JUMLAH		33 orang

Sumber: Renstra Disperindag Kota Blitar tahun 2011-2015

b. Data Pegawai Menurut Eselon

**Tabel 5
Data Pegawai Menurut Eselon Tahun 2012**

No.	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Eselon III	1 orang
2.	Eselon III	4 orang

3.	Eselon IV	10 orang
JUMLAH		15 orang

Sumber: Renstra Disperindag Kota Blitar tahun 2011-2015

c. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 6
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	20 orang
2.	Perempuan	13 orang
Jumlah		33 orang

Sumber: Renstra Disperindag Kota Blitar tahun 2011-2015

h) Data Industri Kecil Menengah

Kondisi Industri Kecil dan Menengah di Kota Blitar terbagi dalam kategori kelompok industri formal dan kelompok industri non formal. Dari kedua kategori tersebut kelompok industri non formal mempunyai peran lebih besar dari segi jumlah unit usaha maupun penyerapan tenaga kerja bila dibandingkan dengan kelompok industri formal. Berikut ini data Industri Kecil dan Menengah Kota Blitar tahun 2011 yang diklasifikasikan berdasarkan Kecamatan.

Tabel 7
Data Industri Unggulan Kota Blitar Tahun 2011

No	Jenis Industri	Kecamatan			Kota Blitar
		Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan	
1.	Bubut kayu	3	201	22	226
2.	Sambel pecel	8	4	3	15
3.	Wajik kletik	1	2	1	4
JUMLAH		12	207	26	245

Sumber: Profil dan Data IKM Kota Blitar Tahun 2011

Tabel 8
Data Jumlah Pengrajin Bubut Kayu Kelurahan Tanggung

No.	Jenis Kerajinan	Skala	Jumlah
1.	Kendang	Besar	17 orang
		Menengah	39 orang
		Kecil	48 orang
2.	Yoyo	Besar	5 orang
		Menengah	5 orang
		Kecil	16 orang
3.	Catur	Besar	1 orang
		Menengah	-
		Kecil	6 orang
4.	Lampu	Besar	1 orang
		Menengah	1 orang
		kecil	-
4.	Alat Rumah Tangga	Besar	-
		Menengah	1 orang
		Kecil	9 orang
5.	Kerajinan	Besar	1 orang
		Menengah	1 orang
		Kecil	11 orang
JUMLAH			162 orang

Sumber: Paguyuban Bubut Kayu Kendang Kelurahan Tanggung Tahun 2011

B. Data Fokus Penelitian

1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Dalam Memberdayakan Industri Kecil Kendang Sentul Sebagai Salah Satu Produk Unggulan Dan Daya Saing Daerah

1.1 Government Provision

Government Provision merupakan bentuk peran pemerintah secara langsung dimana pemerintah menyediakan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia industri kecil dengan memberikan pelatihan dan keterampilan guna menunjang bidang usaha yang

dijalankan oleh para pelaku ekonomi tersebut. Peningkatan kualitas SDM tidak hanya pada teori-teori yang sifatnya hanya materi saja tetapi pemerintah daerah harus lebih optimal lagi dalam meningkatkan penguasaan teknologi bagi industri kecil, seperti halnya penggunaan teknologi tepat guna maupun penguasaan teknologi digital karena perkembangan jaman yang semakin cepat dengan adanya layanan internet.

Sebagian besar industri kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM industri kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengolahan usahanya. Maka dari itu Disperindag Kota Blitar selalu mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara memfasilitasi bagi pelaku usaha industri kecil dalam pelatihan, pembimbingan, dan penyuluhan. Harapan dalam pembinaan dan pelatihan yang di berikan kepada pelaku usaha yaitu agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha yang maju dan dapat bersaing di era globalisasi.

Pada awal munculnya industri kecil bubut kayu kendang sentul Disperindag Kota Blitar sering melakukan Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha bubut kayu kendang sentul. Materi yang disampaikan lebih ditekankan pada dua hal yaitu kreatifitas dalam desain bentuk, variasi gambar dan ukiran, serta keterampilan dalam penggunaan mesin bubut. Hal ini sangat penting karena pada saat itu pengrajin kendang sentul masih sedikit dan masih menggunakan mesin bubut manual bukan mesin. Instrukturnya pun didatangkan dari Kota lain yang

sudah lebih dulu berkecimpung dalam kerajinan bubut kayu. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Agus Sulistiorini selaku kepala bidang perindustrian

Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“Dulu sebelum menjadi sentra industri kecil bubut kayu, kami sering melakukan pelatihan terhadap pengrajin bubut karena kami anggap mereka belum mampu mandiri dan terampil dalam menghasilkan suatu produk dari olahan kayu. Instrukturnya kami datangkan dari jogja dan juga bandung. Sedangkan saat ini setelah menjadi sentra dan akan menjadi kampung wisata, kami tidak lagi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka. Kami memberikan pelatihan bila ada yang mengajukan permohonan lalu kami akan programkan.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 10.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Berdasarkan wawancara di atas di tunjang pula dengan adanya data tentang Jenis Pelatihan dan Kerajinan Kayu pada Tahun 2008-2011 yakni sebagai berikut:

Tabel 9
Data Jenis Pelatihan Kerajinan Kayu 2008-2011

No.	Jenis Pelatihan	Tahun	Jumlah Orang
1.	Pelatihan kayu	2008	30 orang
2.	Workshop (2 kali dalam 1 tahun)	2009	40 orang
3.	Desain Produk	2010	30 orang
4.	Pelatihan kayu	2011	10 Orang

Sumber: Profil Data dan IKM Kota Blitar Tahun 2011

Selama tidak ada yang mengajukan permohonan Disperindag Kota Blitar tetap melakukan pembinaan terhadap industri kecil di Kota Blitar dengan cara mengadakan pertemuan yang diadakan dua kali dalam satu tahun bagi para pelaku

industri kecil di Kota Blitar. Hal tersebut senada dengan penuturan Bu Agus

Sulistiorini selaku kepala bidang perindustrian yang mengatakan:

“Pertemuan antara Disperindag dengan pengerajin merupakan wadah bagi para pengusaha industri kecil untuk mendapatkan wawasan, motivasi dan evaluasi bagi perkembangan usaha mereka. Tujuannya seperti yang ada di dalam LAKIP ini.” (wawancara pada tanggal 12 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Tujuan dari diadakannya pertemuan bulanan antara Disperindag dengan pengrajin adalah:

1. Mengontrol perkembangan industri
2. Memotivasi para pengusaha industri kecil agar mau dan mampu untuk selalu berkreasi dan berinovasi
3. Mengantisipasi dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Berdasarkan pernyataan yang diungkap oleh ibu Agus Sulitiorini selaku kepala bidang perindustrian Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“jika tidak ada yang mengajukan proposal pelatihan kami tetap memberikan pembinaan bagi industri kecil bubut kayu, kami mengundang mereka dalam acara workshop yang diadakan dua kali dalam satu tahun yakni pertengahan tahun dan akhir tahun. Pembinaan ini membahas tentang *shering* masalah, motivasi dan juga evaluasi sejauh mana perkembangan mereka.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 10.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Disperindag menuai tanggapan positif dari peserta pelatihan, karena dengan adanya pembinaan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi pelaku usaha industri kecil serta dapat meningkatkan omset. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Digdo yang merupakan pengrajin, pelaku usaha dan juga sebagai pengurus dari paguyuban industri kecil bubut kayu, beliau mengatakan:

“saya sangat senang dan antusias bila ada pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, pembinaan dan pelatihan dapat

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi kami pelaku usaha industri kecil sehingga dapat meningkatkan omset. Tapi sayang, pelatihan sudah jarang dilakukan lagi, padahal kami sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan baru seperti pelatihan komputer, internet dan lainnya. Karena jujur saya memang gaptek” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)



Sumber: Dokumentasi peneliti

Gambar IV
Bapak Digdo Sebagai Pengrajin Kendang Sentul

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Erna Woerijaningsih selaku kepala seksi logam, mesin, dan kimia Disperindag Kota Blitar. Beliau mengatakan:

“Untuk saat ini kami memang tidak lagi mengadakan pelatihan bagi pelaku industri kecil bubut kayu, karena kami anggap mereka sudah mandiri dan mampu berkreasi, berinovasi sendiri. Sedangkan untuk pelatihan komputer, internet dan kemajuan teknologi lain, memang kami belum memfasilitasi” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 10.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)



Sumber: Dokumentasi peneliti

Gambar V
Ibu Erna Woerijaningsih Selaku Kepala Seksi Logam, Mesin, dan Kimia
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

1.2 Subsidi

Modal merupakan hal yang paling penting dalam kelangsungan suatu usaha. Tanpa adanya modal, suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik begitu juga dengan para pelaku usaha industri kendang juga membutuhkan modal usaha dalam perkembangannya. Dalam peningkatan kemampuan finansial atau dalam pemberian pinjaman modal kepada industri kecil bubut kayu kendang, Disperindag bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Agus Sulistorini selaku kepala bidang perindustrian Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

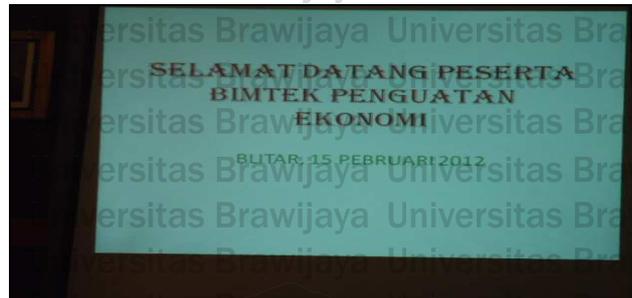
“Untuk hal modal dalam industri kecil pengrajin maupun pelaku usaha menggunakan atau mencari modal sendiri dengan cara pinjam ke lembaga keuangan lain seperti koperasi dan BPR. Disperindag sendiri tidak menyediakan dana untuk dijadikan modal bagi pelaku usaha. Bila ada yang pinjam modal, kami sarankan ke Dinas Koperasi dan UMKM daerah Kota Blitar maupun ke lembaga keuangan lainnya.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 10.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Bantuan modal berupa dana atau uang telah menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM, karena mereka mempunyai struktur tersendiri dalam pelayanan tentang permodalan. Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal permodalan memberikan bantuan pinjaman dana bergulir bagi pemilik usaha yang terdaftar di Disperindag maupun yang ada dalam Dinas Koperasi dan UMKM dengan syarat dan ketentuan berlaku. Setiap tahun sudah dianggarkan, meskipun tidak semua peminjam mendapatkan bantuan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Hani'fah selaku kepala seksi peningkatan kualitas usaha Dinas Koperasi dan UMKM, beliau mengatakan:

“mengenai masalah permodalan, kami memberikan bantuan permodalan melalui penyaluran pinjaman dana bergulir yang setiap tahun kita anggarkan. Pinjaman yang kami berikan maksimal 15 juta rupiah dengan bunga 8% pertahun dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.” (wawancara pada tanggal 8 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Dinkop dan UMKM Kota Blitar)

Selain pemberian pinjaman dana bergulir, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar juga mengadakan pelatihan kepada pelaku usaha dengan tujuan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik mungkin sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Hani'fah selaku kepala seksi peningkatan kualitas usaha Dinas Koperasi dan UMKM, beliau mengatakan:

“kami juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dengan cara pemberian pelatihan mengenai manajemen keuangan. Materi yang biasa disampaikan berupa pembukuan dan manajemen keuangan. Instrukturnya berasal dari kalangan akademisi yang ada di Kota Blitar. Tujuan agar tidak bergantung kepada Dinas Koperasi dan UMKM.” (wawancara pada tanggal 8 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Dinkop dan UMKM Kota Blitar)



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar

Gambar VI Foto Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penguatan Ekonomi

Sedangkan hal lain yang dilakukan Disperindag dalam pemberdayaan industri kecil bubut kayu kendang yaitu pemberian subsidi peralatan dan pemberian subsidi pada program promosi untuk penyelenggaraan pameran atau dalam mengikuti suatu *event* yang diselenggarakan oleh kota-kota lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ibu Erna Woerijaningsih selaku kepala seksi logam, mesin, dan kimia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

Beliau mengatakan:

“Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memang tidak menyediakan bantuan modal kepada pelaku usaha namun, kami menyediakan pelayanan dan mengusahakan bantuan lain yang berupa bantuan peralatan penunjang produksi. Tidak ada syarat khusus bagi pelaku usaha untuk meminta bantuan berupa peralatan, hanya membuat proposal permintaan bantuan peralatan dan akan di programkan atau biasanya jika ada keuangan dari pemerintah daerah, bantuan berupa peralatan sudah menjadi kewajiban Disperindag untuk mencantumkanannya dalam program kerja.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 10.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Berdasarkan wawancara di atas di tunjang pula dengan adanya data tentang Jenis bantuan yang diberikan kepada pengrajin pada Tahun 2008-2009 yakni sebagai berikut:

Tabel 10
Daftar Bantuan Peralatan Yang Diterima Oleh Paguyuban Industri Kecil Bubut Kayu Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul 2008-2009

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Tahun	Penanggung jawab
1.	Dinamo	9 buah	2008	paguyuban
2.	Mesin Bubut	2 buah	2009	Paguyuban
3.	Mesin Pengering	1 buah	2009	Paguyuban
4.	Peralatan bubut kayu dari Disperindag Provinsi	-	2008	Paguyuban

Sumber: Disperindag Kota Blitar

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Digdo selaku pengrajin yang pernah mendapatkan bantuan peralatan yang diberikan oleh Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“Untuk modal usaha saya belum pernah mendapatkan bantuan dari disperindag, tapi untuk peralatan saya pernah mendapatkan seperti dinamo dan mesin bubut. Untuk biaya produksi, biasanya saya menerapkan tawar menawar harga dulu. Jadi sana punya biaya berapa, baru saya buat. Selain itu untuk modal, sudah banyak pihak bank-bank yang menawarkan pinjaman kepada kami dengan berbagai kemudahan, tapi yaitu bunganya begitu besar. Sebenarnya saya mengharapkan peran yang lebih dari disperindag mengenai masalah permodalan.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

Mengenai permasalahan permodalan yang dialami oleh pelaku usaha industri kecil bubut kayu kendang seperti sulitnya mendapat pinjaman modal dengan bunga rendah tertuang dalam LAKIP. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Agus Sulistiirini, beliau mengatakan:

“untuk masalah permodalan yang sering dialami oleh pelaku usaha industri kecil sudah ada pada LAKIP. Nanti pinjam saja di seketariat lalu mas pelajari sendiri.” (wawancara pada tanggal 12 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Uraian lanjut mengenai permasalahan permodalan oleh Disperindag dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan permasalahan modal pada industri kecil antara lain:

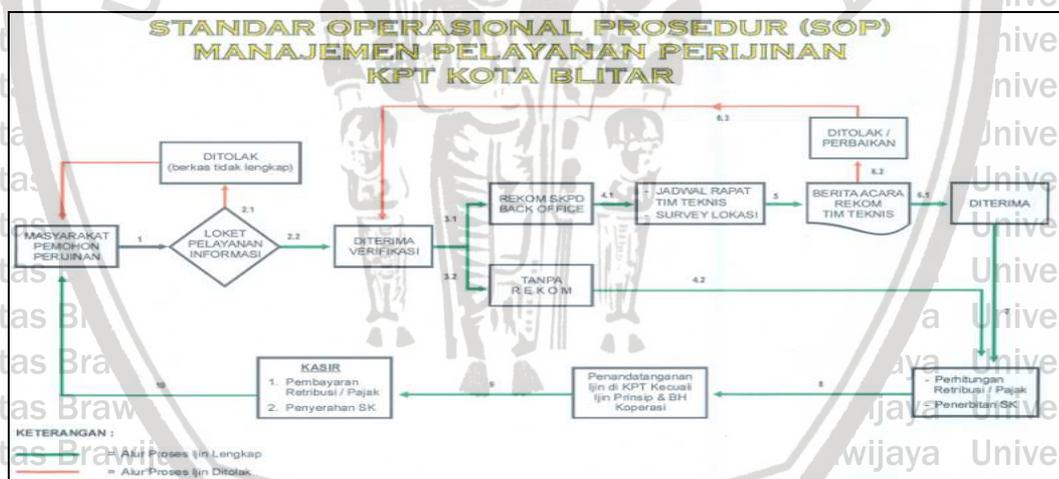
1. Sebagian besar pelaku usaha tidak cukup memiliki agunan yang memiliki nilai ekonomi yang memadai.
2. Kinerja usaha belum mampu memberikan *image positing* yang dapat memberikan kepercayaan bahwa aktifitas usahanya memiliki potensi dan layak untuk diberikan fasilitas permodalan dari sumber-sumber permodalan khususnya perbankan.
3. Belum memiliki *bargening power*/posisi tawar yang cukup kuat sehingga kemampuan negosiasi dengan sumber-sumber permodalan dalam posisi yang lemah

1.3 Regulasi

Dalam mendirikan suatu industri, baik industri besar maupun kecil harus mempunyai ijin lokasi atau tempat usaha agar tempat industri tersebut tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan serta supaya industri kecil tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah. Dengan adanya pengakuan dari pemerintah maka industri tersebut mendapatkan berbagai fasilitas yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Dalam hal pengaturan dan pengendalian terhadap industri kecil melalui perijinan, Disperindag bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Industri (SIUI). Cara, fungsi, besarnya retribusi dan persyaratan untuk memperoleh surat ijin usaha industri sudah tercantun dalam prosedur permohonan surat ijin usaha industri. Hal tersebut senada dengan penuturan Bu Agus Sulistiorini selaku kepala bidang perindustrian yang mengatakan:

“mengenai perijinan Disperindag bekerja sama dengan KPT dalam hal pengeluaran surat ijin usaha industri. Disini tempat untuk berkonsultasi dulu, selebihnya ada pada prosedur. Bentuk prosedurnya seperti ini, nanti mas pelajari kalo ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 10.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)



Sumber: kpt.blitarKota.net

Gambar VII
SOP Manajemen Pelayanan Perijinan

Di dalam prosedur permohonan surat ijin usaha industri, setiap pelaku kegiatan industri wajib mempunyai SIUI yang diterbitkan berdasarkan tempat

kedudukan perusahaan dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. Surat Ijin Usaha Industri berfungsi untuk kepentingan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian, perijinan dan pendaftaran.

Surat Ijin Usaha Industri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Surat Ijin Usaha Industri merupakan legalitas usaha bagi setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan industri dan memperoleh kemudahan untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam pengembangan usahanya.
2. Salah satu alat bagi pemerintah Kota Blitar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dunia usaha dalam rangka tertib usaha di bidang industri.

Namun kenyataannya hanya sebagian palaku usaha industri kendang yang mempunyai surat ijin usaha industri dan surat ijin yang lain, seperti menurut bapak Digdo selaku pemilik usaha kendang yang memiliki surat ijin. Beliau mengatakan:

”di daerah santren yang mayoritas penduduknya pengarajin industri kecil bubut kayu, hanya beberapa saja yang memiliki surat ijin usaha, rata-rata yang mempunyai ijin usaha yaitu temen-temen yang udah mapan atau menengah ke atas, sudah berkembang dengan baik dan ngerti pentingnya surat ijin usaha.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

Pak Digdo yang juga pengurus paguyuban bubut kayu menambahkan alasan kenapa banyak pelaku usaha yang tidak memiliki ijin, beliau mengatakan:

”kebanyakan temen-temen menganggap, mengajukan ijin itu untuk apa bila industri masih kecil, tidak ada untungnya juga ada atau tidak punya ijin kecuali bila industri itu sudah berkembang baru butuh ijin untuk pengakuan usahanya.

Selain itu limbah dari industri kecil bubut kayu tidak mencemari lingkungan, masih bisa memanfaatkan limbah menjadi kerajinan yang lain. selain itu juga belum pernah ada sidak yang dilakukan oleh KPT maupun Disperindag” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

Sebagian dari pernyataan pak Digdo yang menyangkut dengan banyaknya palaku usaha yang belum mempunyai ijin usaha dibenarkan oleh pak Arif Dwi

Listyanto selaku staf bagian pendafaran, pendataan dan informasi Kantor pelayanan Terpadu beliau mengatakan:

“memang sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai ijin usaha, untuk mendapatkan Ijin Usaha Industri diperlukan ijin-ijin yang lain seperti SITU, IMB dan HO. Sedangkan letak produksi mereka masih berada di luar ruangan dengan alas yang seadanya. Jadi wajar bila banyak yang belum punya ijin usaha industri. Untuk masalah limbah, sebenarnya pelaku usaha harus punya ijin, karena gangguan lingkungan bukan hanya limbah saja tetapi juga meliputi kebisingan suara dan pencemaran udara. Sedangkan untuk masalah sidak memang bukan tupoksi dari kami, melainkan tupoksi dari Satpol PP.” (wawancara pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 09.00 di Kantor Pelayanan Terpadu)

Berdasarkan wawancara di atas di tunjang pula dengan adanya data pengrajin yang sudah mempunyai Surat Ijin Usaha Industri sampai pada tahun 2011 yakni sebagai berikut:

Tabel 11
Data Industri Kecil Bubut Kayu Kendang Formal Kota Blitar

No.	Nama Pengusaha/ Usaha	Alamat	Kelurahan	Tenaga Kerja
1.	Kayu Bubut Kendang (Aziz Pramuji)	Tanggung RT 1 / RW 11	Tanggung	6 orang
2.	UD. Tunggal Jaya (Romdhoni)	Jl. Ciliwung 206	Tanggung	14 orang
3.	UD. Ukil Kreatif (Priyo Widigdo)	Jl. Pakubuwono	Tanggung	4 orang
4.	Keluarga Subur Kayu Bubut (Sunardi)	Ngadirejo RT 1 / RW 5	Ngadirejo	5 orang
5.	Kayu Bubut (Mujiadi)	Ngadirejo	Ngadirejo	7 orang

6.	UD. Aneka Usaha (Ali M.)	Ngadirejo	Ngadirejo	6 orang
7.	UD. Bintang Timur (Achwani)	Tanggung	Tanggung	10 orang
8.	UD. Budi Luhur (H. Tohari)	Tanggung	Tanggung	10 orang
9.	Sidik	Tanggung	Tanggung	5 orang
10.	Nurhadi	Tanggung	Tanggung	5 orang
11.	UD. Maju Jaya (Pramu)	Tanggung	Tanggung	10 orang
12.	Sugiat	Tanggung	Tanggung	5 orang
13.	Moch. Daim	Santren	Tanggung	4 orang

Sumber: Profil Data dan IKM Kota Blitar Tahun 2011

1.4 Stimulator

Salah satu sarana utama dalam peningkatan usaha serta peningkatan penjualan produk industri adalah dengan memperluas aspek pemasaran melalui promosi produk industri kecil. Banyak program yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan pengusaha kecil serta memberikan informasi dan sarana pemasaran bagi produk-produk unggulan dari Kota Blitar agar mampu bersaing di tingkat regional dan nasional Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak Naufal selaku kepala seksi promosi dan pemasaran, Disperindag Kota

Blitar beliau mengatakan:

“Dalam hal promosi, Disperindag mempunyai banyak program untuk memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat luas antara lain: penyediaan sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui media internet, elektronik dan cetak; Pameran produk industri pekan raya, gelar potensi produk unggulan baik skala lokal, nasional maupun internasional; *showroom* di daerah pariwisata (di daerah sekitar dan bali); Penempatan produk-produk unggulan di hotel-hotel dan kantor-kantor pemerintah; Seminar/workshop”. (wawancara pada tanggal 12 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Daerah pemasaran produk kembang bukan menjadi kendala bagi pengrajin, apalagi Kota Blitar mempunyai potensi dalam hal pariwisata yaitu adanya kompleks Makam Bung Karno yang merupakan presiden pertama Republik

Indonesia. Di sana juga terdapat *showroom* produk unggulan kerajinan dan olahan makanan khas Kota Blitar. Tetapi *showroom* tersebut dirasa sangat sepi dan disayangkan oleh bapak Romdhoni selaku ketua Paguyuban Bubut Kayu Kendang, beliau berkata:

“adanya *showroom* yang ada di pelataran parkir kendaraan sungguh membantu, tetapi sepi pengunjung padahal produk di sana lengkap. Pengunjung hanya melintasi saja tidak pernah ada arahan untuk mengunjungi *showroom* tersebut.” (wawancara pada tanggal 13 Mei 2012 pukul 10.30 di rumah bapak Romdhoni)



Sumber: Dokumentasi peneliti

Gambar VIII

Bapak Romdhoni Selaku Ketua Paguyuban Pengrajin Bubut Kayu

Pemerintah Kota Blitar mengikutsertakan pelaku industri kecil dalam pameran lokal, regional dan nasional. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Naufal selaku kepala seksi promosi dan pemasaran, Disperindag Kota

Blitar beliau mengatakan:

“dalam setiap *event* pameran produk unggulan yang yang diikuti, disperindag tidak hanya membawa produknya saja tetapi juga selalu mengikutsertakan pelaku industrinya juga. Harapannya produk-produk unggulan Kota Blitar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan para pelaku usaha dapat berinteraksi langsung dengan konsumen.” (wawancara pada tanggal 12 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Digdo selaku pengusaha kembang yang pernah ikut dalam *event* pameran yang diikuti oleh Disperindag, beliau mengatakan :

“Disperindag Kota Blitar dalam mengikuti *event* selalu membawa pengrajinnya sekalian, saat itu saya mengikuti *event* pameran produk unggulan yang diselenggarakan di Kota Batam. Mengenai biaya transportasi, penginapan dan lain-lainya sudah ditanggung oleh Disperindag. Adanya pameran tersebut sangat membantu saya dalam memperkenalkan produk saya berupa kembang dan lainnya. Saya dapat langsung menjualnya ke konsumen yang datang di stand Disperindag.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)



Sumber: Disperindag Kota Blitar

GambarXI
Pameran Expo Batam 2011

Selain promosi yang dilakukan Disperindag, para pelaku usaha juga berharap ada peran lebih yang dilakukan Disperindag dalam hal pemasaran.

Karena bila tidak ada *event*, pelaku usaha mencari daerah pemasaran sendiri.

Meskipun bagi pelaku industri yang sudah berkembang telah mampu untuk memasarkan produk kembangnya ke daerah-daerah lain di tingkat lokal, nasional

bahkan telah *ekspor* ke luar negeri. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Digdo, beliau mengatakan:

“harapan saya kepada Disperindag yaitu Disperindag lebih aktif dalam pemasaran produk unggulan seperti memperbanyak *showroom* yang ada di tempat-tempat pariwisata sehingga memudahkan kami dalam memasarkan produk kami.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

Untuk pemasaran, pelaku usaha kendang mencari daerah pemasaran sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Erna Woerijaningsih selaku kepala seksi logam, mesin, dan kimia Disperindag Kota Blitar. Beliau mengatakan:

“untuk pelaku usaha produk unggulan kendang dan lainnya, saat ini kami hanya membantu melalui promosi lewat *event-event* dan juga melalui *showroom* kami yang ada di Kota Blitar dan Kota Denpasar. Kami tidak membantu mencari daerah pemasaran karena kami anggap mereka sudah mandiri dalam mencari daerah pemasaran.” (wawancara pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 10.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar X
Showroom Produk Kerajinan Dan Makanan Khas Kota Blitar

1.5 Koordinator

Dalam perannya sebagai koordinator, Disperindag Kota Blitar juga melibatkan lembaga-lembaga lainnya, dunia usaha ataupun pihak swasta. Untuk menjalankan fungsinya sebagai koordinator ini, Disperindag mempunyai kegiatan yaitu fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah dengan swasta.

Peran swasta sangat berguna banyak dalam membantu memberikan bantuan modal dan menjalin kontrak kerjasama lainnya. Hal ini diungkap oleh ibu Erna Woerijaningsih selaku kepala seksi logam, mesin, dan kimia Disperindag Kota Blitar. Beliau mengatakan:

“saat ini kami sudah menjalin kemitraan dengan PT Telkom Kota Blitar. PT Telkom meberikan bantuan pinjaman modal dengan bunga rendah kepada pelaku usaha industri dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak PT Telkom. Bagi pelaku usaha yang ingin mendapat bantuan modal dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dan segera kami proses.” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Sampai saat ini, Disperindag masih menjalin kemitraan dengan PT Telkom. Belum ada lagi pihak swasta yang menawarkan menjadi mitra kerja Disperindag. Hal ini dijelaskan oleh ibu Erna Woerijaningsih selaku kepala seksi logam, mesin, dan kimia Disperindag Kota Blitar. Beliau mengatakan:

”mitra kerja Disperindag dalam hal permodalan masih hanya dengan PT Telkom, sebenarnya kami sudah berusaha mencari mitra-mitra lain maupun investor yang mau menanamkan modalnya di produk unggulan kami seperti kendang dengan penyampaian informasi lewat media elektronik maupun cetak” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Selain bermitra dengan pihak swasta, Disperindag juga menjalin kerja sama dengan dinas-dinas yang lain yaitu Disperindag saling berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dalam hal pemberian perijinan usaha

industri yang meliputi penerbitan ijin usaha, survey lokasi, dan sosialisasi masalah perijinan. Hal tersebut senada dengan penuturan Bu Erna Woerijaningsih selaku kepala seksi logam, mesin, dan kimia Disperindag Kota Blitar. Beliau mengatakan:

“mengenai perijinan Disperindag bekerja sama dengan KPT dalam hal pengeluaran surat ijin usaha industri. Penerbitan SIUI dilakukan dengan cara pemohon mengisi blangko persyaratan rangkap dua, satu untuk KPT satu lagi untuk Disperindag setelah itu dilakukan *survey* oleh perwakilan KPT dan Disperindag. Jika memenuhi persyaratan akan keluar rekomendasi dari Disperindag yang kemudian ijin dikeluarkan oleh KPT.” (wawancara pada tanggal 13 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Hal tersebut juga dibenarkana oleh Bu Neni Farida selaku kepala seksi penerimaan dan pelaporan Kantor Pelayanan Terpadu. Beliau mengatakan:

“untuk urusan pengeluaran Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) memang benar bahwa Disperindag saling koordinasi dengan KPT. KPT sebagai koordinator dalam melakukan *survey*, sedangkan Disperindag yang berhak mengeluarkan rekomendasi dari hasil *survey* tersebut. Setelah itu KPT baru mengeluarkan Ijin Usaha Industri yang ditanda tangani oleh kepala KPT.” (wawancara pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 09.00 di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar).



Sumber: Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar

Gambar XI
Sosialisasi Perijinan KPT dengan Disperindag

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Kendang Ditinjau Dari Perspektif Industri Kecil.

Dari wawancara dengan beberapa pengurus paguyuban bubut kayu kendang mengenai faktor pendukung dan kendala yang ada pada desa Santren

Kelurahan Tanggung Kota Blitar, dapat disimpulkan dan diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil bubut kayu kendang antara lain:

2.1 Faktor Pendukung Pemberdayaan

a. Adanya tenaga kerja yang memadai.

Yaitu mulai dari remaja sampai orang tua di daerah sekitar industri kecil bubut kayu kendang bermata pencaharian sebagai pengrajin bubut kayu. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Digdo yang juga menjadi pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu sebagai berikut:

“hampir semua orang di daerah tanggung bisa membuat kerajinan kendang dari bubut kayu, baik remaja hingga orang tua. Hal ini dikarenakan industri bubut kayu sudah ada sejak dulu dan menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk sekitar.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

Hal senada juga diungkap oleh bapak Romdhoni selaku ketua pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu, yang berkata sebagai berikut:

“usaha bubut kayu ini sudah ada sejak dulu dan turun-temurun sampai sekarang. Jadi masyarakat sekitar sudah mahir dengan usaha bubut kayu. Hanya kekreatifitasan mereka yang perlu dikembangkan.” (wawancara pada tanggal 13 Mei 2012 pukul 10.30 di rumah bapak Romdhoni)

b. Bentuk Kendang Dan Motif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa bentuk dan motif yang menjadi ciri khas dari kendang. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Digdo yang juga menjadi pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu sebagai berikut:

“sampai saat ini sudah banyak motif baru dari kendang yang kami buat, hal tersebut juga karena adanya pelatihan dari Disperindag Kota Blitar. Misalnya saja motif ukiran, motif cat airbrush dan lainnya” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

Hal senada juga diungkap oleh bapak Romdhoni selaku ketua pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu, yang berkata sebagai berikut:

“sudah banyak motif yang kami buat kira-kira ada 10 macam motif, dari ukuran besar-kecil. Ataupun bila ada yang meminta motif lain sesuai keinginan pelanggan, kami bisa membuatkan.” (wawancara pada tanggal 13 Mei 2012 pukul 10.30 di rumah bapak Romdhoni)

c. Daerah Pemasaran Yang Tetap.

Daerah pemasaran kendang yang di produksi oleh industri bubut kayu ini sudah ada antara lain di Bali, arena wisata makam bungkarno, dan tempat wisata lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Digdo yang juga menjadi pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu sebagai berikut:

“untuk daerah pemasaran saat ini meliputi wilayah pariwisata lokal, regional, nasional bahkan ada yang ekspor ke luar negeri. Adanya *showroom* yang berada di daerah bali maupun Blitar sangat membantu kami, jadi kami tinggal ngirim ke *showroom-showroom* tersebut.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

Hal senada juga diungkap oleh bapak Romdhoni selaku ketua pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu, yang berkata sebagai berikut:

“Mengenai daerah pemasaran bukan menjadi masalah buat kami. Kami sudah mampu ekspor keluar negeri. Sedangkan untuk industri bubut yang kecil, hasil produksi mereka sudah ada yang menampung yaitu dari teman-teman yang lain dan siap untuk memasarkan. Yang menjadi masalah hanya pada manajemen pemasarannya.” (wawancara pada tanggal 13 Mei 2012 pukul 10.30 di rumah bapak Romdhoni)

d. Kerukunan Antar Sesama Pengrajin.

Didalam penelitian yang dilakukan di daerah santren yang mana hampir setiap rumah memiliki usaha yang sama yaitu bubut kayu, diketahui bahwa persaingan dan kerukunan antar sesama pengrajin berjalan dengan normal dan tidak ada yang saling menghambat usaha satu dengan yang lain, yang terjadi yaitu saling tolong menolong dalam pemasaran produk mereka masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Digdo yang juga menjadi pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu sebagai berikut:

”mengenai persaingan antar pelaku usaha di sini masih berjalan normal, tidak ada yang berusaha menghambat usaha teman, malah yang terjadi saling tolong menolong. Contohnya: bila salah satu pengrajin menerima pesanan yang banyak maka akan dibagi-bagi dengan temen yang lain. Sehingga si pengrajin tidak rugi waktu dan dirinya bisa membuat produk yang lain” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

2.2 Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Industri Kecil

a. Rendahnya Tingkat Pendidikan Yang Ditempuh.

Tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik maupun pengrajin industri kecil kendang masih tergolong rendah. Meskipun usaha kendang berlangsung dengan baik dengan daerah pemasaran yang masih terjamin. Tetapi para pengrajin/pelaku usaha belum mampu menggunakan teknologi yang paling mutakhir yaitu internet dalam pemasaran. Seperti yang

diungkapkan oleh bapak Digdo yang juga sebagai pengurus dari paguyuban bubut kayu kendang sebagai berikut:

“kebanyakan para pemilik maupun pengrajin kendang disini tingkat pendidikan masih rendah jadi mereka masih gaptak dengan teknologi informasi yang baru seperti internet. Hanya beberapa saja yang bisa tetapi bukan untuk kepentingan berbisnis itupun kebanyakan anak muda.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

b. Minimnya Modal Usaha

Modal usaha selalu menjadi penghambat dari berkembangnya suatu usaha karena modal merupakan hal yang paling penting dalam kelangsungan suatu usaha. Tanpa adanya modal, suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik begitu juga dengan para pelaku usaha industri kendang juga membutuhkan modal usaha dalam perkembangannya. Kelemahan industri kecil kendang dalam mengakses sumber-sumber permodalan seperti modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain sulit diperoleh. Meskipun sekarang banyak pihak bank yang menawarkan pinjaman kepada pengrajin dengan berbagai kemudahan tetapi dengan bunga yang cukup tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Digdo yang juga menjadi pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu sebagai berikut:

“untuk satu kali produksi kendang membutuhkan modal yang cukup banyak. Meskipun sekarang banyak bank yang menawarkan bantuan pinjaman tetapi tidak semua bisa mendapatkan pinjaman. Hanya industri kendang yang sudah terpercaya saja yang bisa mendapat bantuan pinjaman dari bank. Selain itu bunga yang mereka berikan juga tinggi.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

Hal senada juga diungkap oleh bapak Romdhoni selaku ketua pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu, yang berkata sebagai berikut:

“modal merupakan kendala bagi industri kecil bubut kayu, apa lagi jika industri tersebut masih skala kecil. Untuk berkembang dan bersaing dengan yang lain akan mengalami kesulitan.” (wawancara pada tanggal 13 Mei 2012 pukul 10.30 di rumah bapak Romdhoni)

c. Krisis Ekonomi Di Eropa

Krisis yang dialami oleh negara-negara Eropa juga berdampak pada ekspor kendang keluar negeri. Para pengrajin mengeluhkan akan dampak yang ditimbulkan dengan adanya krisis yang terjadi di negara Eropa. Perdagangan ekspor kendang keluar negeri menjadi menurun. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Digdo yang juga menjadi pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu sebagai berikut:

“kendala yang dialami akhir-akhir ini yaitu perdagangan ekspor kendang ke luar negeri. Banyak temen-temen yang sudah ekspor kendang keluar negeri melalui showroom yang ada di bali. Kendala ini dikarenakan oleh adanya krisis yang ada di luar negeri khususnya eropa. Jadi terjadi penurunan nilai ekspor kendang keluar negeri.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

Hal senada juga diungkap oleh bapak Romdhoni selaku ketua pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu, yang berkata sebagai berikut:

“memang benar ada penurunan penjualan karena krisis di Eropa. Tetapi ekspor tetap berjalan karena, ekspor kita bukan hanya di eropa saja melainkan di negara-negara Asia maupun Afrika.” (wawancara pada tanggal 13 Mei 2012 pukul 10.30 di rumah bapak Romdhoni)

d. Kemampuan Manajerial Yang Masih Rendah

Kemampuan manajerial yang masih rendah dalam menyusun rencana serta investasi maupun orientasi penjualan dari tahun ke tahun juga menjadi penghambat dalam pengembangan industri kecil. Karena para pemilik belum

sepenuhnya bisa mengatur. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Digdo yang juga menjadi pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu sebagai berikut:

”hampir di setiap industri kecil kendang masih belum mempunyai kemampuan dalam hal manajerial. Kebanyakan dari kami belum mampu mengatur omset penjualan atau manata administrasi keuangan dengan benar. Yang penting barang yang diproduksi laku dan terjual habis sehingga modalnya bisa kembali dan bisa produksi lagi.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

e. Kondisi Cuaca

Salah satu kendala yang cukup mengganggu proses produksi kendang yaitu kondisi cuaca yang tidak menentu. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Digdo yang juga menjadi pengurus paguyuban industri kecil bubut kayu sebagai berikut:

“akhir-akhir ini kendala yang sering dihadapi oleh pengrajin selain krisis ekonomi di Eropa ada juga faktor cuaca. Sebentar panas, sebentar mendung kadang hujan seharian membuat pengeringan kayu sebelum diproduksi menjadi terhambat. Alat pengering bantuan dari Disperindag, kapasitasnya masih minim.” (wawancara pada tanggal 18 Maret 2012 pukul 09.00 di rumah bapak Digdo)

3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Kendang Ditinjau Dari Perspektif Disperindag

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah dan wawancara dengan kepala bidang pengembangan investasi dan promosi mengenai faktor pendukung dan kendala yang ada pada Disperindag Kota Blitar, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemberdayaan industri kecil bubut kayu kendang antara lain:

3.1 Faktor Pendukung Dalam Pemberdayaan Industri Kecil

a. Adanya Struktur Organisasi Yang Terintegrasi

Organisasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana dalam pengembangan industri. Struktur organisasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur organisasi pemerintah merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana pengembangan industri baik itu struktur pemerintah maupun organisasi-organisasi swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki struktur organisasi yang terintegrasi, ini terbukti bahwa dalam pemberian bantuan permodalan dan peralatan produksi dan dalam pembinaan dan pelatihan telah terlaksanan. Seperti yang diungkap oleh bapak Fathorrahman selaku kepala bidang pengembangan investasi dan promosi Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“yang menjadi pendukung pelaksanaan pengembangan industri kecil adalah karena adanya struktur organisasi yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan ramping maka tercipta kerja sama yang baik antara organisasi yang terkait.” (wawancara pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

Selain itu, dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka menimbulkan efek pada program kerja yang jelas, data yang akurat akan mempermudah Disperindag dalam memberdayakan sekaligus memperkenalkan produk-produk dari industri kecil yang ada di Kota Blitar. Disperindag selalu aktif dalam memantau perkembangan dari pelaku industri kecil binaanya melalui evaluasi dan *shering* pendapat antara Disperindag dengan pelaku usaha. Hal ini

seperti yang diungkap oleh bapak Fathorrahman selaku kepala bidang pengembangan investasi dan promosi Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan kami mempunyai program yang tersusun dengan baik, antara lain: pelatihan dan pendidikan, promosi dan pemasaran, workshop, pertemuan rutin. Kami selalu aktif dalam mengikuti pameran-pameran di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional” (wawancara pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

b. Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Memadai

Sumber daya manusia disini bukan dilihat dari sasi skill yang mereka miliki untuk mengembangkan atau memperdayakan industri kecil melalui pelatihan-pelatihan *hard* maupun *soft skill* kepada pengrajin, tetapi sumber daya manusia dilihat dari banyaknya dan tersedianya sumber daya manusia yang ada di instansi atau biasa di sebut staf untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

Banyak sedikitnya staf secara tidak langsung akan mempengaruhi berlangsungnya kinerja dari instansi tersebut. Dengan adanya staf yang memadai pada instransi pemerintah maka akan lebih memudahkan karena dengan sumber daya yang cukup mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Seperti yang diungkap oleh bapak Fathorrahman selaku kepala bidang pengembangan investasi dan promosi Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“kita mempunyai staf yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Jika staf yang bertanggung jawab dalam pengembangan industri jumlahnya kurang, maka pengembangan tersebut juga tidak akan berjalan efektif. Maka dari itu perlu adanya sumber

daya yang memadai.” (wawancara pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

c. Sarana dan Prasarana yang Memadai

Dukungan sarana dan prasana yang memadai merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pemberdayaan industri kecil. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup, akan mempermudah proses pemberdayaan industri kecil yang dilakukan oleh staf. Seperti yang diungkap oleh bapak Fathorrahman selaku kepala bidang pengembangan investasi dan promosi Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“kita mempunyai sarana dan prasarana yang mencukupi untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Selain sarana transportasi kita juga mempunyai aula yang bisa digunakan untuk pertemuan rutin dan cukup memadai.” (wawancara pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

3.2 Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Industri Kecil

a. Dukungan Dana Kurang Memadai

Sumber pendanaan merupakan sumber yang penting dalam mendorong dan memperlancar pengembangan industri kecil. Dengan demikian dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan industri. Dari penelitian di lapangan diketahui bahwa Disperindag Kota Blitar kurang mendapat kucuran dana dari pemerintah propinsi untuk membeli peralatan industri kecil dan untuk melaksanakan pelatihan. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Fahorrahman selaku kepala bidang pengembangan dan investasi Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“untuk masalah permodalan, Disperindag sendiri tidak menyediakan bantuan modal. Jadi pengrajin itu murni menggunakan modal pribadi untuk membiayai produksinya. Tetapi untuk bantuan peralatan kami masih memberikan sebagai bentuk tanggung jawab dan sesuai dalam visi misi yang kami cantumkan” (wawancara pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

b. Kualitas SDM yang Rendah

Kualitas SDM yang rendah ini yang dimaksud yaitu dalam memberikan pelatihan *hard* maupun *soft skill* kepada pengrajin atau pelaku usaha. Staf yang dimiliki oleh Disperindag Kota Blitar masih belum begitu mampu untuk memberikan pemahaman dan pemanfaatan teknologi dalam hal keterampilan. Jadi untuk melakukan kegiatan pelatihan selalu bekerja sama dengan pihak lain seperti kalangan akademisi dan pelaku usaha yang professional. Seperti yang diungkap oleh bapak Fathorrahman selaku kepala bidang pengembangan investasi dan promosi Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“kita memiliki staf yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Namun masih terbatasnya dalam tenaga yang terampil dalam melaksanakan pelatihan. Maka dari itu kami selalu bekerja sama atau mendatangkan pemateri dari kalangan akademisi maupun dari pelaku usaha yang sudah professional untuk melaksanakan pelatihan” (wawancara pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

c. Lemahnya Akses Terhadap Teknologi Informasi

Dari penelitian di lapangan, lemahnya akses pada teknologi informasi ini terjadi pada pemasaran produk IKM melalui *website* yang dimiliki oleh Disperindag. Website yang dimiliki oleh Disperindag kurang *uptodate* dan kurang informatif mengenai penyampaian informasi yang baru. Mengingat kemajuan

teknologi yang semakin canggih, maka sangat penting bagi Disperindag untuk mengembangkannya. Hal ini juga di benarkan oleh bapak Fathorrahman selaku kepala bidang pengembangan investasi dan promosi Disperindag Kota Blitar, beliau mengatakan:

“memang benar, mengenai website memang begitu adanya. Hal itu karena tidak ada yang mengurus secara rutin website yang kita miliki. Jadi biasanya yang kita posting hanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan.” (wawancara pada tanggal 26 Maret 2012 pukul 09.00 di kantor Disperindag Kota Blitar)

C. Pembahasan

1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam Memberdayakan Industri Kecil Kendang Sentul sebagai Salah Satu Produk Unggulan dan Daya Saing Daerah

1.1 Government Provision

Government provision merupakan bentuk peran pemerintah secara langsung dimana pemerintah menyediakan pelayanan kepada masyarakat tanpa melakukan pemungutan kepada individu-individu yang menikmatinya. Guna mengimplementasikan peran sebagai *government provision*, pertama, pemerintah daerah perlu mengkaji kembali upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia industri kecil dengan memberikan pelatihan dan keterampilan guna menunjang bidang usaha yang dijalankan oleh para pelaku ekonomi tersebut.

Kedua pemerintah daerah harus lebih optimal lagi dalam meningkatkan penguasaan teknologi bagi industri kecil, seperti halnya penggunaan teknologi tepat guna maupun penguasaan teknologi digital. Guna menyongsong era globalisasi yang mana pelaku pasar tidak lagi berorientasi pada pasar domestik

tetapi pasar internasional. Sedangkan yang ketiga, pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan manajemen dan organisasi pada industri kecil yang sekarang masih tradisional agar pengusaha industri kecil mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan berupa modal.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa, Pada awal munculnya industri kecil bubut kayu kendang di desa Santren Kecamatan Kepanjenkidul ini tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun yang ada sejak dulu. Desa santren ini dari dahulu sudah terkenal dengan usaha bubut kayu. Sampai pada akhirnya ada seorang turis yang bertemu dengan seorang pengrajin bubut. Turis itu membawa sebuah kendang dari afrika dan menawarkan kepada pengrajin untuk dibuatkan kendang seperti yang dia bawa. Berawal dari situlah kendang yang sekarang menjadi icon Kota Blitar terus di produksi dan dipasarkan ke dalam hingga luar negeri.

Di karenakan sebagian besar industri kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM industri kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengolahan usahanya. Maka dari itu Disperindag Kota Blitar selalu mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara memfasilitasi bagi pelaku usaha industri kecil dalam pelatihan, pembimbingan, dan penyuluhan. Harapan dalam pembinaan dan pelatihan yang di berikan kepada pelaku usaha yaitu agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha yang maju dan dapat bersaing di era globalisasi.

Pada mulanya Disperindag Kota Blitar sering melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha bubut kayu kendang sentul. Materi yang disampaikan lebih ditekankan pada dua hal yaitu kreatifitas dalam desain bentuk, variasi gambar dan ukiran, serta keterampilan dalam penggunaan mesin bubut. Hal ini sangat penting karena pada saat itu pengrajin kendang sentul masih sedikit dan lemah dalam penggunaan mesin bubut. Instrukturnya pun didatangkan dari Kota lain yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam kerajinan bubut kayu.

Pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Disperindag menuai tanggapan positif dari peserta pelatihan, karena dengan adanya pembinaan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi pelaku usaha industri kecil serta dapat meningkatkan omset. Sedangkan untuk saat ini jumlah pengrajin sudah sangat banyak serta tidak perlu lagi pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku industri kecil bubut kayu kendang sentul. Pelatihan dan pendidikan hanya dilakukan Disperindag jika ada permintaan dari kelompok pelaku industri kecil yang baru memulai usaha dengan mengajukan proposal pelatihan ke Disperindag. Hal ini sangat disayangkan oleh kebanyakan pelaku usaha industri kecil bubut kayu karena mereka masih membutuhkan bimbingan dari Disperindag. Pelatihan yang diperlukan oleh pelaku usaha saat ini mengenai penggunaan teknologi komputer. Mereka berharap bisa bertransaksi melalui media internet dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Sedangkan saat ini kebanyakan para pelaku usaha masih gaptak dengan teknologi komputerisasi.

Jika tidak ada yang mengajukan proposal pendidikan dan pelatihan bukan berarti tugas Disperindag sebagai *government provision* berhenti. Disperindag

tetap bekerja sebagai pengawas dan pengevaluasi mengenai perkembangan usaha yang mereka jalankan. Cara yang dilakukan Disperindag yaitu dengan *door to door* maupun mengundang para pelaku usaha maupun pengrajin dalam acara workshop dua kali dalam satu tahun. Selain itu Disperindag juga melakukan pengawasan terhadap mutu yang akan dipasarkan agar tidak terjadi penipuan kualitas yang diberikan kepada konsumen. Pelatihan dan pendidikan yang dilakukan Disperindag saat ini sudah tidak menggunakan instruktur dari luar kota, tetapi dari pelaku usaha yang dulu menjadi binaan Disperindag. Mereka dipercaya karena dianggap sudah mumpuni atau mampu dalam memberikan pelatihan kepada pelaku usaha bubut kayu baru.

Jadi dapat disimpulkan bawah peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu para pengrajin bubut kayu kendang maupun pelaku usaha kendang saat ini kurang mendapat perhatian dari Disperindag Kota Blitar. Hal ini terbukti dari pembinaan yang hanya dilakukan bila ada permintaan dari pelaku usaha ataupun pengrajin. Dan pemantauan hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun melalui workshop. Padahal pengrajin masih membutuhkan pembinaan-pembinaan lain seperti pemanfaatan teknologi internet untuk memperluas pangsa pasar. Hal ini kurang sesuai dengan teori menurut Hetifah sjaifudin (1996:66-75) tentang strategi pengembangan industri kecil bahwasannya melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem permagangan pada pusat-pusat penelitian dan pengembangan mengembangkan SDM dan teknologi seperti melakukan pembinaan terhadap

industri kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara rutin dan berkelanjutan harus ada dalam setiap program kerja pemerintah.

1.2 Subsidi

Subsidi merupakan keterlibatan pemerintah secara tidak langsung dan pada dasarnya adalah berupa bantuan dana (*grants*) secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengimplementasi peran ini, pertama pemerintah harus secara adil dan bijak dalam memberikan modal usaha bagi pengembang industri kecil.

Dewasa ini dalam mengaktualisasikan peran ini terkadang pemerintah salah sasaran sehingga industri kecil yang seharusnya dibantu justru tidak dibantu.

Bantuan tidak hanya berupa modal, tetapi juga dalam bentuk peralatan penunjang usaha. Kedua, pemerintah daerah harus membuka kran kemudahan akses permodalan dari lembaga daerah yang ada di daerah. Dengan lembaga perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah mempunyai peluang yang lebih besar untuk menggandeng para pengusaha industri kecil untuk dapat eksis dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa modal merupakan hal yang paling penting dalam kelangsungan suatu usaha. Tanpa adanya modal, suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik begitu juga dengan para pelaku usaha industri kembang juga membutuhkan modal usaha dalam perkembangannya. Dalam peningkatan kemampuan finansial atau dalam pemberian pinjaman modal kepada industri kecil kembang, Disperindag sama sekali tidak memberikan bantuan berupa modal kepada pelaku usaha industri

kendang tetapi membantu melalui pemberian berupa peralatan. Sedangkan dalam pemberian subsidi berupa modal, Disperindag bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM karena Dinas Koperasi dan UMKM memiliki struktur tersendiri mengenai permodalan. Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal permodalan memberikan bantuan pinjaman dana bergulir bagi pemilik usaha yang terdaftar di Disperindag maupun yang ada dalam Dinas Koperasi dan UMKM dengan syarat dan ketentuan berlaku. Setiap peminjam berhak mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 15 juta rupiah.

Selain memberi pinjaman dana bergulir kepada pelaku usaha Dinas Koperasi dan UMKM juga mengadakan pelatihan kepada pelaku usaha mengenai manajemen keuangan, dengan tujuan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik mungkin sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan. Hal ini dikarenakan Dinas Koperasi dan UMKM berkeyakinan bahwa pelaku usaha masih kesulitan dalam pengelolaan permodalan yang diberikan. Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM berlangsung tiga kali dalam satu tahun. Instrukturnya berasal dari kalangan akademisi yang ada di Kota Blitar. Tetapi kegiatan pelatihan ini belum menunjukkan perkembangan karena masih banyak pelaku usaha yang meminjam modal. Agar modal pinjaman dapat digunakan secara maksimal dan mengetahui bagaimana perkembangan setelah melakukan pinjaman maka dilakukan monitoring. Selain itu monitoring dan evaluasi juga berfungsi untuk meminimalisir kecurangan dalam hal pelunasan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memberi surat teguran kepada peminjam jika tidak memenuhi

kewajibannya. Sedangkan untuk mengantisipasi membengkaknya tingkat peminjam, Dinas Koperasi dan UMKM juga mengarahkan untuk meminjam dana ke perbankan atau badan keuangan lainnya.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa Disperindag memang tidak memerikan bantuan modal kepada pelaku usaha. Tetapi subsidi bantuan tidak hanya berupa modal, tetapi juga dalam bentuk peralatan penunjang usaha. Dalam penelitian lapangan diketahui bahwa Disperindag menyediakan pelayanan dan mengusahakan subsidi yang berkaitan dengan mengenai bantuan peralatan penunjang produksi. Tidak ada syarat khusus bagi pelaku usaha untuk meminta bantuan berupa peralatan, hanya membuat proposal permintaan bantuan peralatan dan akan di programkan atau biasanya jika ada keuangan dari pemerintah daerah, bantuan berupa peralatan sudah menjadi kewajiban Disperindag untuk mencantulkannya dalam program kerja. Program pemberian bantuan berupa peralatan dilakukan bergilir, sehingga bagi kelompok pelaku usaha yang sudah pernah mendapat bantuan dari Disperindag tidak akan mendapat peralatan yang sama. Bantuan peralatan yang pernah diberikan Disperindag antara lain: pengering kayu, mesin bubut, dan dynamo genset.

Mengenai permasalahan permodalan yang dialami oleh pelaku usaha industri kecil sudah tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi antara lain:

1. Sebagian besar pelaku usaha tidak cukup memiliki agunan yang memiliki nilai ekonomi yang memadai.

2. Kinerja usaha belm mampu memberikan *image positing* yang dapat memberikan kepercayaan bahwa aktifitas usahnya memiliki potensi dan layak untu diberikan fasilitas permodalan dari sumber-sumber permodalan khususnya perbankan.

3. Belum memiliki *bargening power*/posisi tawar yang cukup kuat sehingga kemampuan negosiasi dengan sumber-sumber permodalan dalam posisi yang lemah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Disperindag Kota Blitar tidak membantu dalam hal pemberian pinjaman modal kepada pelaku usaha, tetapi Disperindag Kota Blitar bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam hal pemberian pinjaman dana bergulir. Selain itu Disperindag Kota Blitar juga memberikan bantuan berupa peralatan penunjuang produksi dengan membuat proposal. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Hetifah Sjaifudin yaitu strategi peningkatan kemampuan finansial terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui “pemberian modal sementara”. Dan hendaknya Disperindag tidak berhenti sampai disitu saja, Disperindag Kota Blitar harus membantu pelaku usaha industri kecil bubut kayu kendang yang bermodal rendah agar lebih mudah dalam peminjaman modal di bank ataupun lembaga keuangan lainnya.

1.3 Regulasi

Regulasi merupakan keterlibatan pemerintah secara tidak langsung berupa pembuatan kebijakan pelayanan yang ditujukan baik kepada produsen pelayanan

maupun pihak konsumen. Untuk mereliasasikan produk pelayanan ini pertama kali pemerintah harus mengeluarkan kebijakan persaingan sehat, sebab tanpa persaingan yang sehat, posisi jual industri kecil akan dapat terkalahkan oleh para pelaku usaha berskala besar sehingga bukan hanya berdampak pada macetnya industri kecil tetapi juga dapat mengancam eksistensi dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah. Langkah kedua adalah pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan pengurangan beban ekonomi biaya tinggi. Hal ini dapat di aktualisasikan dengan adanya pembentukan kantor pelayanan terpadu satu atap dimana segala pelayanan yang berhubungan dengan industri kecil baik itu perijinan dan lain sebagainya cukup diselesaikan dalam satu kantor tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa dalam mendirikan suatu industri, baik industri besar maupun kecil harus mempunyai ijin lokasi atau tempat usaha agar tempat industri tersebut tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan serta supaya industri kecil tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah. Dengan adanya pengakuan dari pemerintah maka industri tersebut mendapatkan berbagai fasilitas yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Dalam hal pengaturan dan pengendalian terhadap industri kecil melalui perijinan, Disperindag bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Industri (SIUI). Hal ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Surat ijin usaha industri merupakan legalitas usaha bagi setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan industri dan memperoleh

kemudahan untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam pengembangan usahanya.

2. Salah satu alat bagi pemerintah Kota Blitar untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dunia usaha dalam rangka tertib usaha di bidang industri.

Mengenai pengaturan dan pengendalian industri dalam perijinan, Disperindag bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.

Disperindag mempunyai fungsi salah satunya dalam pemberian ijin usaha, dalam hal ini Disperindag memberikan rekomendasi dan sarana konsultasi kepada pelaku industri kecil agar mempunyai Surat Ijin Usaha Industri (SIUI) yang selanjutnya proses perijinan ada di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar. Setiap pelaku kegiatan industri wajib mempunyai SIUI yang diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. SIUI berfungsi untuk kepentingan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian, perijinan dan pendaftaran.

Meskipun perijinan ini sangat penting bagi pelaku usaha, namun dalam penelitian ditemukan bahwa hanya sebagian palaku usaha industri kendang yang menengah ke atas saja yang mempunyai surat ijin usaha industri dan surat ijin yang lain. Mereka menganggap bahwa mengajukan ijin itu untuk apa bila industri masih kecil, tidak ada untungnya juga ada atau tidak punya ijin kecuali bila industri itu sudah berkembang mereka butuh ijin untuk pengakuan usahanya.

Selain itu limbah dari industri kecil bubut kayu tidak mencemari lingkungan, kami masih bisa memanfaatkan limbah menjadi kerajinan yang lain.

Disperindag dan KPT juga membenarkan bahwa masih banyak pelaku usaha industri yang belum mempunyai ijin. Mereka beralasan bahwa dalam melakukan *survey* lokasi, banyak dijumpai tempat-tempat produksi kendang bubut kayu masih di luar ruangan yang tertutup kain terpal. Sedangkan untuk mendapatkan IUI diharuskan mempunyai surat-surat ijin yang lain seperti IMB, SITU, dan HO. Jadi wajar saja bila pelaku industri tersebut belum mempunyai ijin. Sedangkan menanggapi pernyataan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan atau ijin HO, KPT tidak sependapat dengan hal tersebut, karena gangguan lingkungan tidak hanya berasal dari limbah hasil produksi tetapi juga dari gangguan suara dan pencemaran udara akibat dari mesin-mesin produksi.

Mengenai sidak dan sanksi bagi pelaku usaha yang belum mempunyai ijin KPT dan Disperindag memang tidak menangani karena bukan tupoksi dari mereka.

Untuk penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan WaliKota merupakan tupoksi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Seharusnya antara ketiga dinas terkait yaitu Disperindag, KPT dan Satpol PP lebih berkoordinasi, mengingat pentingnya ijin usaha bagi pelaku industri. Hal ini kurang sesuai dengan apa yang diungkap oleh Hetifah Sjaifudin mengenai perijinan, baik itu industri kecil maupun besar harus mempunyai ijin usaha supaya mendapatkan pengakuan sungguh-sungguh dari pihak yang berkepentingan.

1.4 Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah-daerah dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlet* untuk produk industri kecil dan membantu industri kecil untuk melaksanakan pameran. Adapun langkah pemerintah daerah untuk mengaktualisasikan peran stimulator yaitu pertama dengan upaya peningkatan penguasaan pasar dengan cara yang paling sederhana yaitu melibatkan pihak pengusaha industri kecil dalam *event* pameran produk unggulan baik di dalam maupun di luar negeri. Kedua adalah penataan tempat usaha melalui penataan *outlet-outlet* industri kecil termasuk penataan jalur transportasi untuk memudahkan akses konsumen menuju lokasi penjualan produk industri kecil.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa salah satu sarana utama dalam peningkatan usaha serta peningkatan penjualan produk industri adalah dengan memperluas aspek pemasaran melalui promosi produk industri kecil. Dalam hal ini, Disperindag mempunyai banyak program untuk memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat luas antara lain:

1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui media internet, elektronik dan cetak.
2. Pameran produk industri pekan raya, gelar potensi produk unggulan baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional.

3. Pemanfaatan *showroom* di daerah pariwisata (di pelataran parkir Makam Bung Karno dan Bali).
4. Penempatan produk-produk unggulan di hotel-hotel dan kantor-kantor pemerintah.
5. Seminar/workshop.

Semua kegiatan tersebut dilakukan guna meningkatkan kemampuan pengusaha kecil serta memberikan informasi dan sarana pemasaran bagi produk-produk unggulan dari Kota Blitar agar mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.

Selain itu untuk hal promosi, pemasaran dan sarana informasi Disperindag selalu aktif dalam mengikuti pameran ataupun gelar produk unggulan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Blitar maupun yang diselenggarakan oleh kota-kota lain. tidak hanya produk unggulannya saja yang dibawa dalam pameran, pengrajinnya pun juga dibawa untuk mempromosikan produk unggulannya hal ini bertujuan agar pengrajin dapat berinteraksi sendiri dalam memasarkan produknya.

Sampai saat ini pemasaran produk kendang sudah melingkupi seluruh Indonesia yang tersebar di area-area pariwisata dan juga beberapa pengrajin sudah mampu untuk ekspor produknya keluar negeri yaitu di kawasan Asia, Eropa dan Afrika.

Bila tidak ada pameran pengrajin mencari daerah pemasaran sendiri. Untuk ekspor keluar negeri, para pelaku usaha kendang di Kota Blitar masih bergantung pada eksportir dari Jawa Tengah, Jakarta dan Bali.

Selain ikut dalam pameran, Disperindag juga mempunyai sarana lain untuk mempromosikan produk unggulannya yaitu sebuah *showroom* yang mana di dalam *showroom* tersebut terdapat berbagai macam produk unggulan dari Kota

Blitar salah satunya kembang sentul. Tempatnya sangat strategis yaitu terdapat di area pelataran parkir kendaraan para pengunjung Makam Bung Karno. Meskipun begitu para pengunjung *showroom* masih tergolong sepi peminat. Selain di kawasan MBK, Kota Blitar juga mempunyai *showroom* yang ada di Bali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Disperindag dalam hal stimulator, sudah bekerja dengan baik. Terbukti dengan banyaknya program-program yang diikuti dan strategi-strategi yang digunakan untuk memperkenalkan produk unggulan dari Kota Blitar. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hetifah Sjaifudin yaitu peran pemerintah maupun swasta dalam membantu dan membuka akses pasar dan informasi yang seluas-luasnya bagi penjualan produk industri kecil sangat diperlukan sekali.

1.5 Koordinator

Sebagai koordinator, pemerintah daerah mempunyai peran untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga bisa melibatkan lembaga-lembaga lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi. Langkah strategis dalam mengaktualisasikan dalam membentuk asosiasi pengusaha industri kecil atau himpunan kelompok usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa Disperindag Kota Blitar juga melibatkan lembaga-lembaga lainnya, dunia usaha ataupun pihak swasta. Untuk menjalankan fungsinya sebagai koordinator ini, Disperindag

mempunyai kegiatan yaitu fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah dengan swasta yang tercantum dalam renstra Disperindag tahun 2011-2015. Peran swasta sangat berguna banyak dalam membantu memberikan bantuan modal dan menjalin kontrak kerjasama lainnya. Sampai saat ini Disperindag sudah menjalin kemitraan dengan pihak swasta yaitu PT Telkom. Kemitraan ini bekerja sama dalam hal pemberian pinjaman bunga lunak kepada pelaku usaha industri dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak PT Telkom. Bagi pelaku usaha yang ingin mendapat bantuan modal dapat mendaftar di Disperindag dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini Disperindag masih belum begitu aktif dalam menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga lain maupun swasta. Terbukti hingga saat ini Disperindag masih bermitra dengan satu pihak swasta yaitu dengan PT Telkom.

Selain bekerja sama dengan pihak swasta, diketahui juga di dalam penelitian di lapangan bahwa Disperindag juga bekerja sama dengan lembaga daerah lain seperti Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar. Kerja sama ini adalah hal penerbitan ijin usaha, *survey* lokasi, dan sosialisasi perijinan kepada pelaku usaha industri kecil. Setiap pelaku usaha industri kecil wajib memiliki ijin usaha baik itu industri kecil maupun besar. Penerbitan SIUI dilakukan dengan cara pemohon mengisi blangko persyaratan rangkap dua, satu untuk KPT satu lagi untuk Disperindag setelah itu dilakukan *survey* oleh perwakilan KPT dan Disperindag. Saat *survey* ini KPT lebih berperan sebagai koordinator. Hasil *survey* di lapangan akan diserahkan kepada Disperindag, jika memenuhi persyaratan akan

keluar rekomendasi dari Disperindag yang kemudian di kembalikan ke KPT untuk dikeluarkan dan untuk ditanda tangani oleh kepala KPT.

2. Fakor Pendukung Dan Penghambat Dalam Perspektif Pelaku Industri

2.1 Faktor Pendukung

a. Adanya Tenaga Kerja Yang Memadai

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tenaga kerja industri bubut kayu kendang ini sudah dimulai dari usaha turun temurun sampai sekarang. Hampir semua rumah, remaja sampai orang tua di daerah sekitar industri kecil bubut kayu kendang bermata pencaharian sebagai pengrajin bubut kayu kendang. Sejak dari dulu para pengrajin sudah terbiasa dengan bubut kayu jadi tidak ada kendala dengan cara membubut kayu.

b. Bentuk Kendang Dan Motif

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa bentuk, ukuran dan motif yang menjadi ciri khas dari kendang. Misalnya saja motif ukiran, motif cat airbrush, furnish dan lainnya. Bila ada pesanan dengan motif lain, para pengrajin siap untuk membuat. Banyaknya motif dari kendang karena adanya pelatihan dari Disperindag Kota Blitar melalui materi desain produk.

c. Daerah Pemasaran Yang Tetap

Daerah pemasaran kendang yang di produksi oleh industri bubut kayu ini sudah ada antara lain di Bali, arena wisata Makam Bung Karno, dan tempat-tempat wisata lainnya. Tidak hanya itu, bagi pelaku usaha yang bermodal besar bisa memasarkan produknya hingga keluar negeri. Sedangkan bagi pengusaha menengah ke bawah dapat menitipkan produksinya di *showroom-showroom* yang ada di Bali maupun di Blitar. Atau juga dengan bekerja sama dengan pengrajin lain untuk menampung hasil produksi mereka dan di jualkan ke daerah pemasaran yang lain.

d. Kerukunan Antar Sesama Pengrajin

Didalam penelitian yang dilakukan di daerah santren yang mana hampir setiap rumah memiliki usaha yang sama yaitu bubut kayu, diketahui juga bahwa persaingan dan kerukunan antar sesama pengrajin berjalan dengan normal dan tidak ada yang saling menghambat usaha satu dengan yang lain, yang terjadi yaitu saling tolong menolong dalam pemasaran produk mereka masing-masing. Contohnya: bila salah satu pengrajin mempunyai pesanan yang banyak maka akan dibagi-bagi dengan teman sesama pelaku usaha. Sehingga si pengrajin tidak rugi waktu dan dirinya bisa membuat produk yang lain.

2.2 Faktor Penghambat

a. Rendahnya Tingkat Pendidikan Yang Ditempuh.

Tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik maupun pengrajin industri kecil kendang masih tergolong rendah. Meskipun usaha kendang berlangsung dengan baik dengan daerah pemasaran yang masih terjamin, tetapi kebanyakan dari pengrajin dalam pemasaran masih sangat tergantung pada pariwisata daerah. Dari penelitian yang dilakukan para pengrajin belum mampu menggunakan teknologi yang paling mutakhir yaitu internet dalam pemasaran.

b. Minimnya Modal Usaha

Modal usaha selalu menjadi penghambat dari berkembangnya suatu usaha karena modal merupakan hal yang paling penting dalam kelangsungan suatu usaha. Tanpa adanya modal, suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik begitu juga dengan para pelaku usaha industri kendang juga membutuhkan modal usaha dalam perkembangannya. Modal yang dibutuhkan dalam satu kali produksi kendang juga sangat besar untuk membeli bahan baku. Kelemahan industri kecil kendang dalam mengakses sumber-sumber permodalan seperti modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain sulit diperoleh. Meskipun sekarang banyak pihak bank yang menawarkan pinjaman kepada pengrajin dengan berbagai kemudahan tetapi dengan bunga yang cukup tinggi.

c. Krisis Ekonomi Di Eropa.

Dari penelitian di lapangan diketahui bahwa krisis yang dialami oleh negara-negara Eropa juga berdampak pada ekspor kendang keluar negeri. Para pengrajin mengeluhkan akan dampak yang ditimbulkan dengan adanya krisis yang terjadi di negara Eropa perdagangan ekspor kendang keluar negeri menjadi menurun. Tetapi itu bukan menjadi kendala yang berarti karena pangsa pasar ekspor kendang bukan hanya di Eropa tetapi di Asia dan juga Afrika.

d. Kemampuan Manajerial Yang Masih Rendah.

Kemampuan manajerial yang masih rendah dalam menyusun rencana serta investasi maupun orientasi penjualan dari tahun ke tahun juga menjadi penghambat dalam pengembangan industri kecil. Karena para pemilik belum sepenuhnya bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan dari hasil penjualan kendang. Yang mereka tahu, modal habis digunakan untuk produksi dan barang dapat terjual habis sehingga modalnya bisa kembali dan bisa melanjutkan produksi lagi.

e. Kondisi Cuaca

Kondisi cuaca yang tidak menentu menyulitkan pengrajin dalam melakukan proses pengeringan bahan baku dari kayu mahoni untuk diproses lebih lanjut. Sampai saat ini pengrajin bubut kayu kendang masih bergantung pada panas yang dihasilkan oleh terik matahari, karena belum tersedianya alat pengering yang memadai yang di berikan oleh Disperindag.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Perspektif Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3.1 Faktor Pendukung

a. Adanya Struktur Organisasi Yang Terintegrasi

Organisasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana dalam pengembangan industri baik itu struktur pemerintah maupun organisasi-organisasi swasta.. Struktur organisasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki struktur organisasi yang terintegrasi, ini terbukti bahwa dalam pemberian bantuan permodalan dan peralatan produksi dan dalam pembinaan dan pelatihan telah terlaksana dengan baik meskipun masih ada kekurangan yang wajar.

Selain itu, dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka menimbulkan efek program kerja yang jelas dengan data yang akurat akan mempermudah Disperindag dalam memberdayakan sekaligus memperkenalkan produk-produk dari industri kecil yang ada di Kota Blitar. Disperindag selalu aktif dalam memantau perkembangan dari pelaku industri kecil binaanya melalui evaluasi dan *shering* pendapat antara Disperindag dengan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa Disperindag sudah mempunyai program yang tersusun dengan baik dalam hal pelatihan dan pendidikan teknis, promosi dan pemasaran, workshop dan pertemuan rutin seperti yang tercantum pada rencana strategis tahun 2011-2015.

b. Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Memadai

Sumber daya manusia disini bukan dilihat dari segi *skill* yang mereka miliki untuk mengembangkan atau memperdayakan industri kecil melalui pelatihan-pelatihan *hard* maupun *soft skill* kepada pengrajin, tetapi sumber daya manusia dilihat dari banyaknya dan tersedianya sumber daya manusia yang ada di instansi atau biasa di sebut staf untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

Banyak sedikitnya staf secara tidak langsung akan mempengaruhi berlangsungnya kinerja dari instansi tersebut. Dengan adanya staf yang memadai pada instansi pemerintah maka akan lebih memudahkan karena dengan sumber daya yang cukup mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa terdapat 33 staf. Terdiri dari 20 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Dimana staf tersebut memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, perintah dan ajnuran dari atasan. Hal itu terbukti dengan pernah diraihnya penghargaan untuk stand terbaik saat mengikuti pameran produk unggulan di Kota Batam tahun 2010.

c. Sarana dan Prasarana yang Memadai

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pemberdayaan industri kecil. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup, akan mempermudah proses pemberdayaan industri kecil yang dilakukan oleh staf. Berdasarkan penelitian di lapangan diketahui bahwa disperindag mempunyai sarana transportasi yang sangat

mendukung dan juga sarana untuk pertemuan-pertemuan rutin / rapat berupa alua yang cukup luas.

3.2 Faktor Penghambat

a. Dukungan Dana Kurang Memadai

Sumber pendanaan merupakan sumber yang penting dalam mendorong dan memperlancar pengembangan industri kecil. Dengan demikian dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan industri. Dari penelitian di lapangan diketahui bahwa Disperindag Kota Blitar kurang mendapat kucuran dana dari pemerintah propinsi untuk membeli peralatan industri kecil dan untuk melaksanakan pelatihan.

b. Kualitas SDM Yang Rendah

Kualitas SDM yang rendah ini yang dimaksud yaitu dalam memberikan pelatihan *hard* maupun *soft skill* kepada pengrajin atau pelaku usaha. Staf yang dimiliki oleh Disperindag Kota Blitar masih belum mampu untuk memberikan pembelajaran keterampilan hal ini karena Disperindag Kota Blitar kekurangan tenaga yang ahli dan terampil dalam bidang-bidang tertentu. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa untuk melakukan kegiatan pelatihan selalu bekerja sama dengan pihak lain seperti kalangan akademisi dan pelaku usaha yang profesional.

c. Lemahnya Akses Terhadap Teknologi Informasi

Lemahnya akses pada teknologi informasi ini terjadi pada pemasaran produk IKM melalui *website* yang dimiliki oleh Disperindag. Website yang dimiliki oleh Disperindag kurang *uptodate* dan kurang informatif mengenai penyampaian informasi yang baru. Mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka sangat penting bagi Disperindag untuk mengembangkannya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di ketahui bahwa tidak ada staf yang bertugas untuk meng-*update* berita atau informasi terbaru yang ada di Kota Blitar khususnya masalah perindustrian dan perdagangan.

Berdasarkan uraian dari fokus penelitian dan pembahasan yang terjadi di lapangan ditemukan bahwa industri kecil kerajinan bubut kayu kendang sentul sebagai produk unggulan dan daya saing daerah Kota Blitar mempunyai keunikan tersendiri dari bentuk dan motif kendang sehingga memunculkan daya saing yang cukup tinggi di pasar kerajinan bubut kayu khususnya produk kendang. Di tambah lagi dengan melimpahnya sumber daya manusia di daerah Tanggung dalam menggunakan peralatan bubut kayu yang jumlahnya mencapai 600 pekerja dan 226 industri yang ada di Kota Blitar dan di klaim oleh *Surabaya Metropolis.com* sebagai sentra industri kecil bubut kayu terbesar di Indonesia.

Jadi produk industri kecil bubut kayu kendang di Kota Blitar mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan masuk dalam keunggulan diferensiasi. Hal ini sesuai dengan teori menurut Porter (1993:10) konsep keunggulan kompetitif muncul karena adanya suatu persaingan dalam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Ketika perusahaan mampu memberikan

manfaat yang sama sebagai kompetitor tetapi dengan biaya yang lebih rendah (keunggulan biaya), atau memberikan manfaat yang melebihi orang-orang produk yang bersaing (keunggulan diferensiasi). Porter menjelaskan pandangan berbasis sumber daya, dalam rangka untuk mengembangkan keunggulan kompetitif perusahaan harus memiliki sumber daya dan kemampuan yang unggul daripada pesaingnya.

Industri kecil bubut kayu kendang di Kota Blitar belum mampu untuk bersaing di tingkat internasional karena masih ada jarak yang cukup jauh dari pelaku usaha besar dengan pelaku usaha dibawahnya. Dari 226 industri yang ada di Kota Blitar hanya ada 17 pelaku usaha dengan skala besar itu pun hanya ada di kelurahan Tanggung. Sedangkan untuk unggul dalam hal biaya, industri kecil bubut kayu kendang di Kota blitar belum bisa. Karena dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang ada menjadikan harga barang itu semakin rendah dengan sendirinya. Sedangkan pelaku usaha saai ini masih kesulitan dalam modal usaha dan di tambah lagi dengan bahan baku yang sudah sulit ditemukan di Kota Blitar.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari data-data yang diperoleh serta fokus penelitian dapat disimpulkan bahwa

1. Kendang sentul yang menjadi salah satu Icon serta produk unggulan Kota Blitar tergolong unggul kompetitif dalam tingkat regional nasional dengan unggul secara deferensiasi hal ini dapat dibuktikan dengan data total jumlah pengrajin bubut kayu kerajinan kendang di Kota Blitar yang mencapai 226 industri kecil dan lebih dari 600 pekerja di klaim oleh *Surabaya Metropolis.com* “*Bubut Kayu Blitar Yang Memikat*” sebagai sentra bubut kayu terbesar di Indonesia. Selain itu kendang sentul mempunyai keunikan tersendiri dalam hal bentuk dan motif kendang.
2. Dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar belum maksimal. Dapat dilihat dari 5 fokus yang dipeneliti lakukan hanya 1 mendekati sempurna yaitu pada sektor stimulator (promosi dan pemasaran). Untuk 4 fokus lainnya masih belum maksimal diantaranya:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pengrajin bubut kayu kendang maupun pelaku usaha kendang saat ini kurang mendapat perhatian dari Disperindag Kota Blitar. Karena saat ini pembinaan hanya

dilakukan bila ada permintaan dari pengrajin. Padahal pengrajin masih membutuhkan pembinaan-pembinaan lain seperti pemanfaatan teknologi internet untuk memperluas pangsa pasar. Dan juga untuk regenerasi atau pelestarian kerajinan di masa yang akan datang.

- b. Untuk subsidi, Disperindag Kota Blitar hanya memberikan bantuan berupa peralatan penunjuang produksi. Disperindag Kota Blitar tidak membantu dalam hal pemberian pinjaman modal kepada pelaku usaha karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, seharusnya Disperindag juga bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perbankan agar pelaku usaha mendapatkan bantuan modal dengan bunga rendah.
- c. Mengenai regulasi atau perijinan, Disperindag bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar. Disperindag mempunyai fungsi salah satunya dalam pemberian ijin usaha, dalam hal ini Disperindag memberikan rekomendasi dan sarana konsultasi kepada pelaku industri kecil. Namun dalam penelitian ditemukan bahwa hanya sebagian palaku usaha industri kecil bubut kayu kendang yang menengah ke atas saja yang mempunyai surat ijin usaha industri dan surat ijin yang lain.
- d. Dalam hal koordinator, Disperindag mempunyai kegiatan yaitu fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil dan menengah dengan swasta yang tercantum dalam renstra Disperindag tahun 2011-2015. Sampai saat ini Disperindag sudah menjalin kemitraan dengan pihak swasta yaitu PT Telkom. Kemitraan ini bekerja sama dalam pemberian pinjaman bunga lunak kepada pelaku usaha industri dengan syarat yang ditetapkan oleh

pihak PT Telkom. Selain dengan pihak swasta yaitu PT Telkom, Disperindag juga bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yang lain yaitu dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar dalam pengurusan ijin dan survey ke lokasi pemohon ijin.

3. Faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan industri kecil bubut kayu kendang dalam perspektif Disperindag Kota Blitar adalah

a. Faktor pendukung

1. Adanya struktur organisasi yang terintegrasi
2. Kuantitas sumber daya manusia yang memadai (banyaknya dan tersedianya staf)
3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai

b. Faktor penghambat

1. Dukungan dana kurang memadai
2. Kualitas sumber daya manusia yang rendah (keahlian pemahaman dan pemanfaatan teknologi dalam hal keterampilan)
3. Lemahnya Akses Terhadap Teknologi Informasi

4. Faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan industri kecil bubut kayu kendang dalam perspektif pelaku usaha adalah

a. Faktor pendukung

1. Adanya tenaga kerja yang memadai.
2. Bentuk kendang dan motif.
3. Daerah pemasaran yang tetap.
4. Kerukunan antar sesama pengarajin.

b. Faktor penghambat

1. Rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh.
2. Minimnya modal usaha
3. Krisis ekonomi di eropa.
4. Kemampuan manajerial yang masih rendah.
5. Kondisi cuaca yang tidak menentu

B. SARAN

1. Dalam memberikan pelatihan dan keterampilan kepada pelaku usaha maupun pengrajin harus dilakukan secara terus menerus, bukan bila ada permintaan saja. Pelatihan terampilan hendaknya perlu banyak variasi agar peserta pelatihan tidak menjadi jenuh. Selain itu Disperindag harus mendengar kemauan dari peserta mengenai pelatihan apa yang mereka butuhkan. Misalnya saja pelatihan tentang teknologi komputer.
2. Mengenai masalah permodalan yang sering dihadapi, Disperindag Kota Blitar harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah. Selain itu Disperindag Kota lebih aktif lagi dalam mencari mitra kerja dan investor untuk mengembangkan industri kecil yang ada di Kota Blitar
3. Mengenai pemasaran hasil produksi industri kecil bubut kayu kendang, diharapkan dapat membuka atau menambah *showroom-showroom* baru di daerah tujuan pariwisata. Agar daerah pemasaran menjadi luas dan

produk-produk unggulan Kota Blitar menjadi terkenal sehingga terjadi persaingan yang sehat dengan produk-produk dari daerah lain.

4. Untuk *showroom* yang ada di pelataran Makam Bung Karno lebih dihidupkan dengan arahan bagi pengunjung untuk mengunjungi *showroom* produk kerajinan dan makanan khas Kota Blitar karena masih terlihat sepi.

5. Harus lebih memproteksi pelaku usaha dari eksportir, karena untuk ekspor kendang pelaku usaha di blitar masih bergantung pada eksportir.

6. Dalam ijin usaha atau regulasi yang lain hendaknya Disperindag dan KPT Kota Blitar lebih aktif berkoordinasi dengan Satpol PP untuk turun ke lapangan menindak dan memeriksa perijinan usaha industri kecil bubut kayu kendang yang mana saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha industri. Karena Satpol PP mempunyai tupoksi untuk menegakkan Peraturan Daerah.

7. Dalam era globalisasi saat ini penggunaan teknologi informasi seperti *website* sangat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan *website* yang menarik, atraktif dan berisi informasi yang aktual kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanro, Herry. 2002. *“Prinsip Dasar Pengembangan Ekonomi Daerah”*. Bandung: Disertai yang tidak di publikasikan.
- Dumairy, 2006. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Hanafi, Imam dan Imam Hardjanto. 2006. *Entrepreneurship Kewirausahaan*. Malang: Universitas Brawijaya Malang
- Hardjanto, Imam. 2008. *Berbagai Dimensi Administrasi Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Malang
- Irianto, Yusuf. 1996. *Industry Kecil Dalam Perspektif Pembinaan Dan Pengembangan*. Surabaya: Airlangga Universitas Press
- Juwani, Ahmad. 1996. *Usaha Kecil Menyongsong Pasar Besar*. Pikiran Rakyat
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memudahkan Pertumbuhan & Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi, Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?*. Jakarta: Erlangga
- Milles, Matthew dan A. Michel Huberman. 1992. *Analisis Penelitian Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohandi*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Poerwadinata. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Porter, M.E. 1993. *Keunggulan Bersaing, Menciptakan Dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Jakarta: Erlangga
- Prijono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Saleh, Irsan Azhary. 1986. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan Dan Perbandingan*. Jakarta: LP3ES
- Sedamaryanti. 2003. *Good governance dalam rangka otonomi daerah (upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan)*

Sjafudin, Hetifah. 1995. *Strategi Dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akgita

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Social & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Sumodiningrat, dkk. 2000. *Kajian Paradigm Pemberdayaan Rakyat*. SPAMEN Angkatan VI

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press

Syarif, Syahrizal. 1991. *Industri Dan Tenaga Kerja*. Pusat Penelitian Universitas Andalas: Padang.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3S

Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat

INTERNET

Anonymous. "Competitive Advantage", diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://www.quickmba.com/strategy/competitive-advantage>

Adyanta, I Made, "faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara", diakses pada tanggal 9 Januari 2012 dari <http://imadeadyanta.blogspot.com/2010/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi>

Hamzah, Denny. "modul-6" diakses pada tanggal 9 Januari 2012 dari <http://dennyhamzah.dosen.narotama.ac.id/files/2011/10/Modul-6-.pdf>

Jayadi, hapipi. 2011. "*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*", diakses pada tanggal 9 Januari 2012 dari <http://hapipi-jayadi.blogspot.com/2011/11/pembangunan-dan-pemberdayaan-masyarakat>

JURNAL

Supriyadi, Ery. 2007. Telaah kendala penerapan pengembangan ekonomi local: pragtisme dalam praktek pengembangan PEL. Jurnal perencanaan wilayah dan kota, vol 18 No 2 Agustus 2007, hal 103-123

Tarwiyanto, Junaidi. 2010. Tiga daya dan pengembangan ekonomi regional.
Jurnal ekonomi dan bisnis, vol 9No. 1 April 2010 : 29-42

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1984. Tentang Perindustrian

Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil



Lampiran 1



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

Jl. Kalimantan No. 39 Telp. 0342-804063 Blitar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 040 /410.204/2012

UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN / SURVEY / RESEARCH

Memperhatikan : Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal, 20 Pebruari 2012 Nomor : 2054/JUN 10.3/PG/2012 Perihal: Permohonan Ijin Penelitian / Survey / Research
 Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk melakukan Permohonan Ijin Penelitian / Survey / Research oleh :

N a m a : **PRISKA EFFENDY SETIAWAN**
N I M : 0810310103
Jurusan : Administrasi Publik
Judul : Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Kendang Sentul Sebagai Produsul Unggulan dan Daya Saing Daerah Kota Blitar (Studi Tentang Pemberdayaan Industri Kecil Kendang Sentul di Kelurahan Tanggung Kota Blitar)
Alamat : Perum GKR Blok M.8 Sananwetan Kota Blitar
Tempat Pelaksanaan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar
Waktu Pelaksanaan : 27 Pebruari 2012 s/d 27 April 2012

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud , diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar, 27 Pebruari 2012

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 DAERAH KOTA BLITAR



H. SY. GENDA, S.Sos. M.Si
 Pembina Tingkat I

Lampiran 2



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

Jln. Sumatra No.60 Telp. 0342-804430, Fax. 0342-814323 e-mail : diperindag@blitar.go.id, diperindagkotablitar@yahoo.co.id

B L I T A R
 Kode Pos 66131

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 0638 / 410.108 / 2012

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si
 NIP : 19660423 199203 1 007
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PRISKA EFFENDY SETIAWAN
 NIM : 0810310103
 Program Studi : Ilmu Administrasi
 Jurusan : Administrasi Publik
 Universitas : Universitas Brawijaya Malang

Telah melakukan penelitian untuk keperluan Skripsi dengan judul 'Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Industri Kecil Kendang Sentul sebagai Produk Unggulan dan Daya Saing Kota Blitar' pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar pada tanggal 27 Februari s/d 27 April 2012

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 10 Mei 2012

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
 Kota Blitar



Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si

Rembina Utama Muda
 NIP. 19660423 199203 1 007

Lampiran 3

INTERVIEW GUIDE**Pertanyaan untuk Disperindag**

1. Mengapa kendang sentul dipilih sebagai icon dari kota blitar? Apa keunggulannya dibanding dengan produk2 lain?
2. Bagaimana gambaran umum kondisi Industri Kecil Kendang sentul saat ini??
3. Adakah Kebijakan khusus dalam pemberdayaan produk unggulan ini?
4. Yang biasa dilakukan disperindag dalam pemberdayaan itu apa?
5. Permasalahan yang sering dikeluhkan pelaku industri kecil kendang sentul itu apa?
6. Peran/program disperindag terhadap industri kecil kedepan tertuju pada aspek apa saja?
7. Pemerintah memiliki peran sebagai government provision salah satunya melakukan pembinaan industri kecil dalam hal sumber daya manusia, penguasaan teknologi. Apa saja yang telah dilakukan disperindag dalam hal ini?
8. Tentang permodalan, apa saja yang dilakukan disperindag dalam membantu masalah permodalan?
9. Dalam hal regulasi, Apakah ada syarat yang harus dipenuhi untuk membuka suatu insdustri kecil yang baru dalam hal perijinan?
10. Untuk hal promosi, pemasaran dan sarana informasi apa saja yang telah diberikan disperindag dalam hal tersebut?
11. Mengenai kemitraan, siapa saja yang menjadi mitra disperindag dalam pemberdayaan inustri kecil kendang sentul?
12. Kendala apa yang dihadapi disperindag dalam pemberdayaan industri kecil?
13. Faktor pendukung dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh disperindag?

Pertanyaan untuk pengrajin

1. Sejak kapan mendirikan usaha ini dan berapa jumlah pegawai sampai saat ini?
2. Bagaimana kondisi dan perkembangan usaha kendang sentul pada saat ini?
3. Apa bapak takut dengan banyaknya produk dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan produk bapak?

4. Bagaimana persaingan antar pengrajin maupun dengan produk luar daerah mengenai harga dan kualitas?
5. Apa saja kendala yang dialami selama menjalankan usaha ini?
6. Apa pernah mengikuti program dari Disperindag dan Sampai saat ini apa saja yang dilakukan oleh disperindag dalam pemberdayaan industri kendang sentul ini?
7. Apakah mempunyai ijin usaha? Apa semua pelaku industri kecil disini mempunyai ijin usaha dan tercatat di data disperindag? Jika tidak apa ada sanksinya?
8. Modalnya untuk satu kali produksi berapa dan dari mana?
9. Bagaimana cara pemasaran produk industri ini dan sudah sampai kemana saja?
10. Adanya PIPP dan area sekitar MBK apakah sudah membantu dalam hal pemasaran?
11. Apakah ada forum komunikasi antara pelaku industri dengan disperindag?
12. Apa saran untuk disperindag dalam perkembangan industri kecil?
13. Harapan apa yang anda inginkan demi berkembangnya industri kecil anda? Dan Dalam hal promosi, pemasaran dan informasi, apa yang bapak harapkan dari disperindag?



Lampiran 4

CURRICULUM VITAE

Nama : Priska Effendy Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa : 0810310103

Tempat dan tanggal lahir : Blitar, 27 Januari 1990

Pendidikan : 1. TK Santa Maria 1996
2. SDN Bendogerit 3 Tamat tahun 2002
3. SMP Negeri 2 Blitar Tamat tahun 2005
4. SMA Negeri 2 Blitar Tamat tahun 2008
5. S1 Fakultas Ilmu Administrasi (Jurusan
Administrasi Publik) Universitas Brawijaya
masuk tahun 2008



Lampiran 5

PROSES PRODUKSI KENDANG SENTUL



Gambar 1. Bahan Baku Kendang Sentul



Gambar 2. Proses Pengulitan Bahan Baku

Lampiran 6



Gambar 3. Proses Pemasangan Kayu di Mesin



Gambar 4. Proses Pembubutan

Lampiran 7



Gambar 5. Kendang Sentul Setengah Jadi



Gambar 6. Pewarnaan Kendang Sentul

Lampiran 8



Gambar 7. Proses Pemasangan Tali Kendang



Gambar 8. Kendang Sentul Jadi

Lampiran 9

SARANA PROMOSI INDUSTRI KECIL BUBUT KAYU KENDANG



Gambar 9. Pekan Raya Blitar



Gambar 10. Bazar Sabtu – Minggu

Lampiran 10



Gambar 11. Stand Bazar Sabtu – Minggu



Gambar 12. Stand Blitar Jaman Dulu Tahun 2012